

DINAS TENAGA KERJA
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MALANG

[Bizagi Modeler](#)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini sebagai bagian implementasi dari area perubahan penataan tatalaksana pada reformasi birokrasi yaitu adanya dokumen Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam upaya mencapai kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk segala saran, kritikan dan masukan yang bersifat perbaikan sangat diharapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal.

Malang, Februari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ARIF TRI SASTYAWAN, S, STP, M. SI
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19790709 199810 1 001

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Reformasi birokrasi dilakukan untuk melaksanakan perubahan sistematis dan terencana. Mencapai tatanan administrasi instansi pemerintahan yang baik, dan menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki sikap profesional, efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan terciptanya *good governance*. *Good governance* ini menjadi syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan cita – cita bangsa dan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman berbasis elektronik diperlukan standarisasi proses bisnis yang terintegrasi berbasis elektronik.

Proses reformasi birokrasi dilakukan terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam instansi pemerintahan agar semakin baik dengan peningkatan efektivitas serta efisiensi birokrasi yang mengacu pada proses bisnis yang dijalankan oleh birokrasi untuk menghasilkan *output* serta *outcome*. Proses bisnis yang tidak mengacu pada hasil dan tidak dapat terukur antar satu organisasi dengan unit organisasi lainnya akan berdampak pada hasil pelaksanaan program serta kegiatan yang tidak optimal. Oleh sebab itu, unit organisasi membutuhkan peta proses bisnis yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi mengenai organisasi tersebut ke dalam suatu bentuk dokumen atau database organisasi. Peta proses bisnis menjadi kebutuhan dan keperluan yang melibatkan setiap elemen di dalam suatu organisasi. Proses penyusunan peta proses bisnis dapat memastikan akurasi serta kelengkapan dari proses bisnis yang sudah digambarkan dalam peta proses bisnis sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

II. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
- b. Untuk menciptakan komunikasi yang baik antar pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang akan dijalankan sehingga mencapai visi, misi dan tujuan
- c. Untuk dijadikan aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis. Aset pengetahuan ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam proses pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja

Adapun manfaat dari peta proses bisnis sebagai berikut ini :

- a. Memudahkan dalam melihat potensi dari suatu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu proses bisnis didalam suatu organisasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang terarah untuk penyempurnaan proses bisnis
- b. Menjadi suatu standar dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehingga akan mempermudah dalam mengendalikan serta mempertahankan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan.

III. Ruang Lingkup

Pembuatan serta penyusunan peta proses bisnis ini dilakukan oleh seluruh perangkat daerah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis meliputi kegiatan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan dokumen rencana strategis serta rencana kerja organisasi.

SK PENETAPAN PETA PROSES BISNIS



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MALANG

NOMOR: 188.45/03 /35.73.406/2023

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS

PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/354/KPTS/013/2021 Tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Peta Proses Bisnis pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
MALANG
NOMOR : 188.45/ O3 /35.73.406/2023
TENTANG PENETAPAN PETA PROSES
BISNIS PADA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

PETA PROSES BISNIS

- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Bagian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

DISNAKER, PM-PTSP

Manjerial



P6 bagian umum dan kepegawaian



P7 jabatan fungsional (analisis keuangan, Analisis perencanaan muda)

Utama



P1 Ketenagakerjaan



P2 Pengembangan iklim dan Penanaman Modal



P3 Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi



P4 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya



P5 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum

Disnaker PMPTSP



P8 Pertimbangan & Rekomendasi Pemberian Perizinan (dinas terkait)



P9 Koordinasi Pelayanan Perlindungan (BP2MI, P3MI, CPMI / PMI)



P10 Fasilitasi dan Rekomendasi (BLK PROVINSI)



P11 Koordinasi dan Mediasi Upah dan HI (SERIKAT PEKERJA, ASOSIASI PENGUSAHA)



P12 Publikasi (MEDIA MASA)



P13 Kemitraan dan Kerjasama (TRIPARTIT, DEWAN PENGUPAHAN)



P14 Kebijakan, Pembinaan, dan Konsultasi (MASYARAKAT, BPJS KETENAGAKERJAAN)



P15 Pengawasan (PENGAWAS PROVINSI)



P16 Promosi (PELAKU USAHA, DPMPPTSP PROV)



P17 Kebijakan (DPMPPTSP PROV, DINAS TERKAIT)



P18 Pengendalian (BIDANG TERKAIT, DPMPPTSP PROV, BKPM)



P19 Pengaduan (DINAS TERKAIT)

Lainnya



P20 Data dan Informasi (KOMINFO, BPS, BAPPEDA)



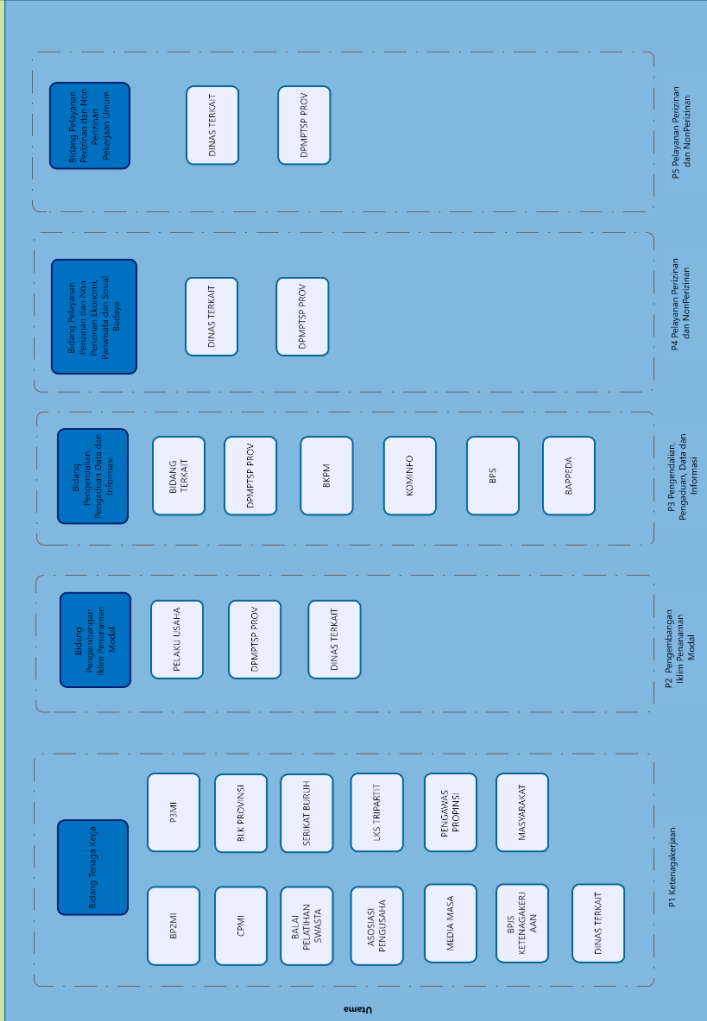
P21 Perizinan dan Nonperizinan (DINAS TERKAIT, DPMPPTSP PROV)



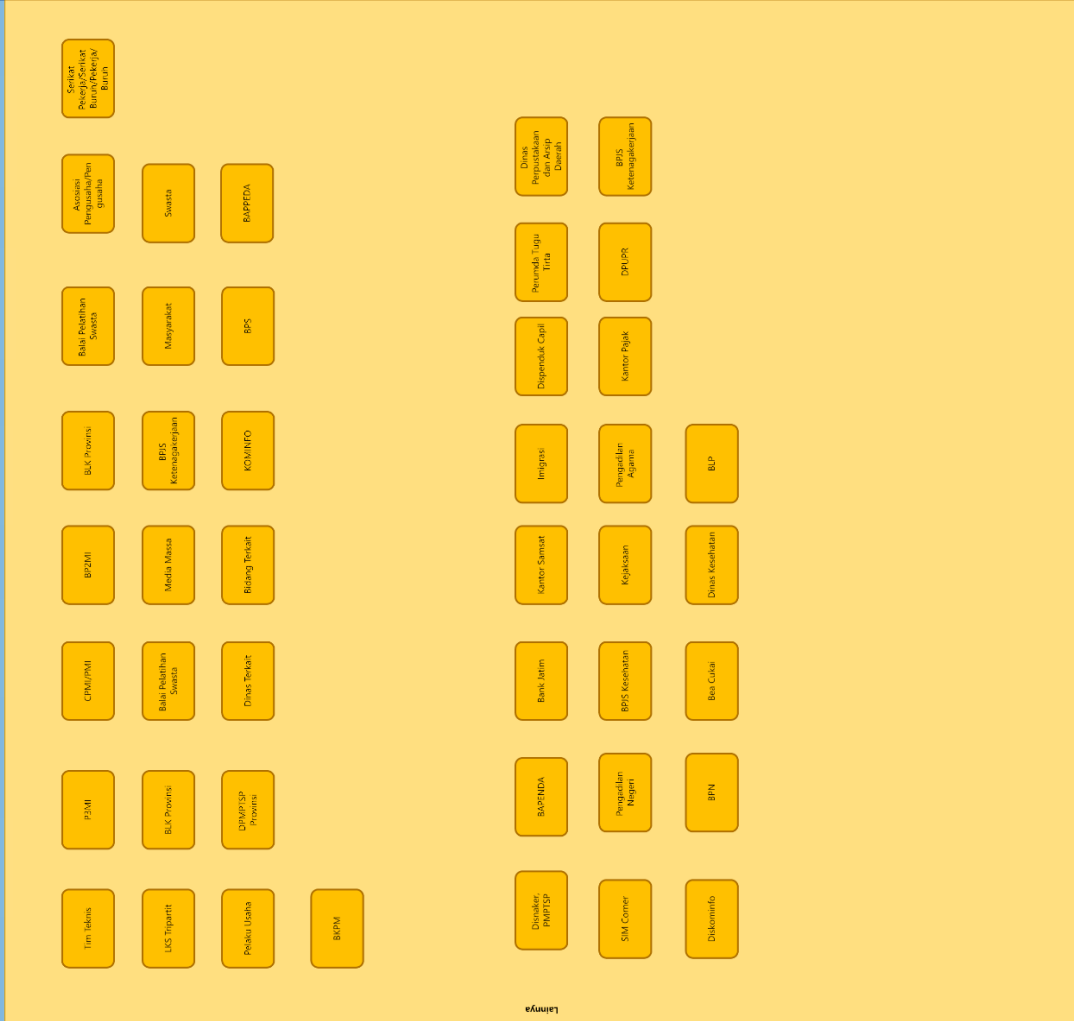
P22 Perizinan dan Nonperizinan (DINAS TERKAIT, DPMPPTSP PROV)



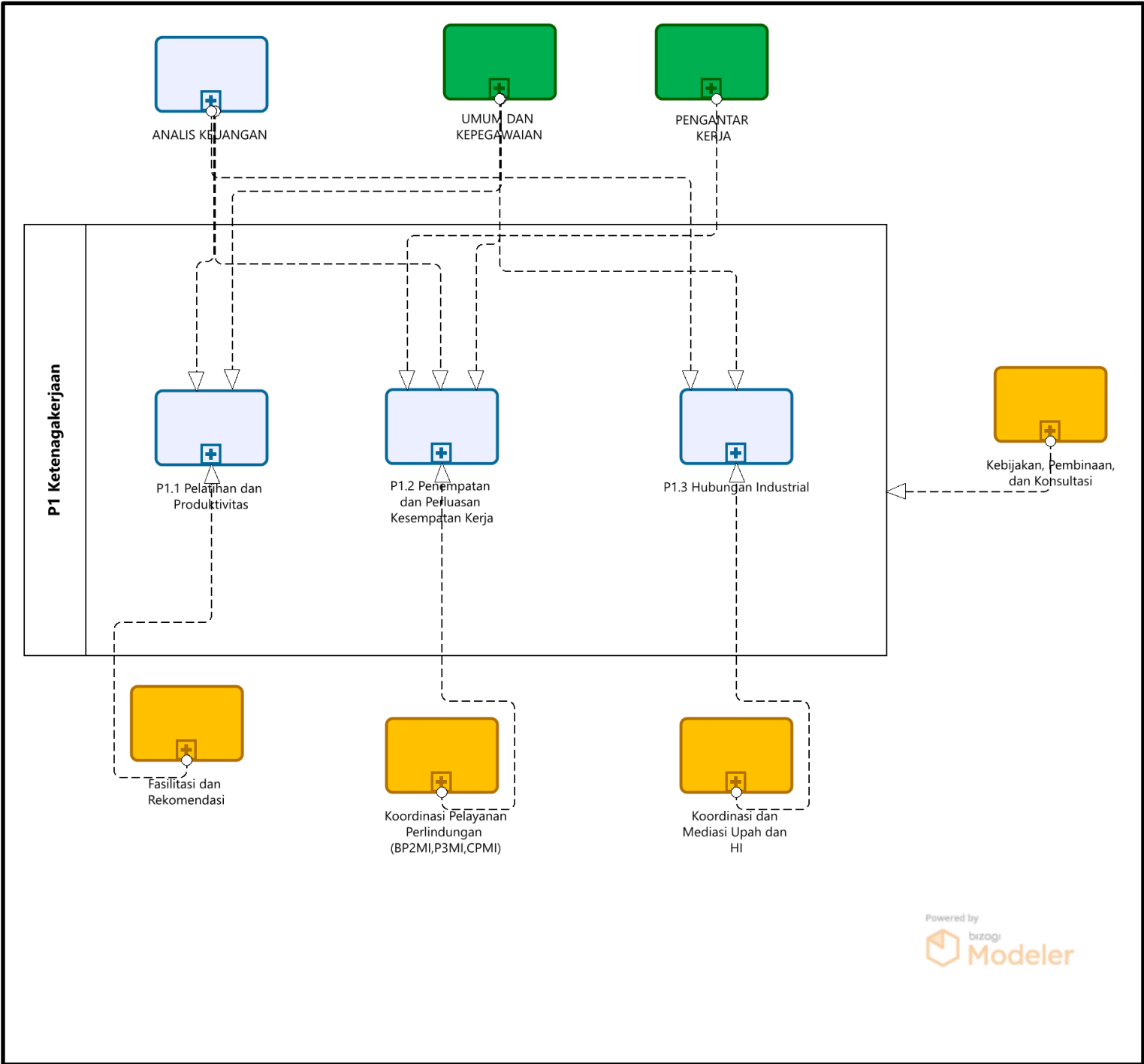
P23 MPP (24 TENAN)

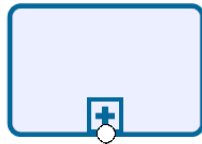


Disnaker PMPTSP



P1 KETENAGAKERJAAN

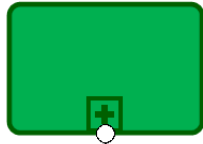




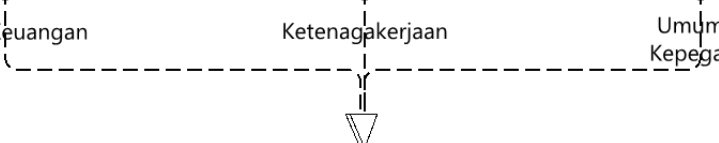
Analisis Keuangan



Ketenagakerjaan



Umum dan Kepegawaian



P1. 1 Pelatihan dan Produktivitas



P1.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi



P1.1.2 Pengesahan Perjanjian Magang Dalam Negeri



P1.1.3 Monitoring Evaluasi

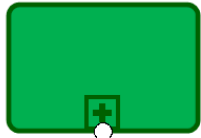


Fasilitasi dan Rekomendasi

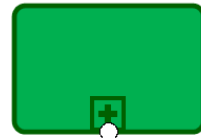




Analisis Keuangan



Umum dan Kepegawaian



Pengantar Kerja



Ketenagakerjaan



P1.2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



P1.2.1 Pelayanan AK1



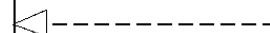
P1.2.2 Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus



P1.2.3 Pelayanan Rekomendasi Paspor CPMI



Koordinasi Pelayanan Perlindungan (BP2MI, P3MI, CPMI)

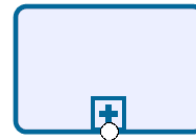




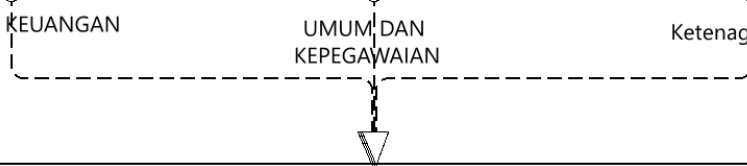
ANALIS KEUANGAN



UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



Ketenagakerjaan



P1.3 Hubungan Industrial



P1.3.1 Pembinaan
LKS Tripartit Kota
Malang dan
Pemantauan UMK,
THR, dan
Penanganan May
Day



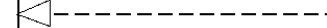
P1.3.2 Pembinaan
Tentang Pemahaman
dan Tata Cara
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Internasional



P1.3.3 Pembinaan
Peraturan Syarat-Syarat
Kerja, Pengupahan dan
Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

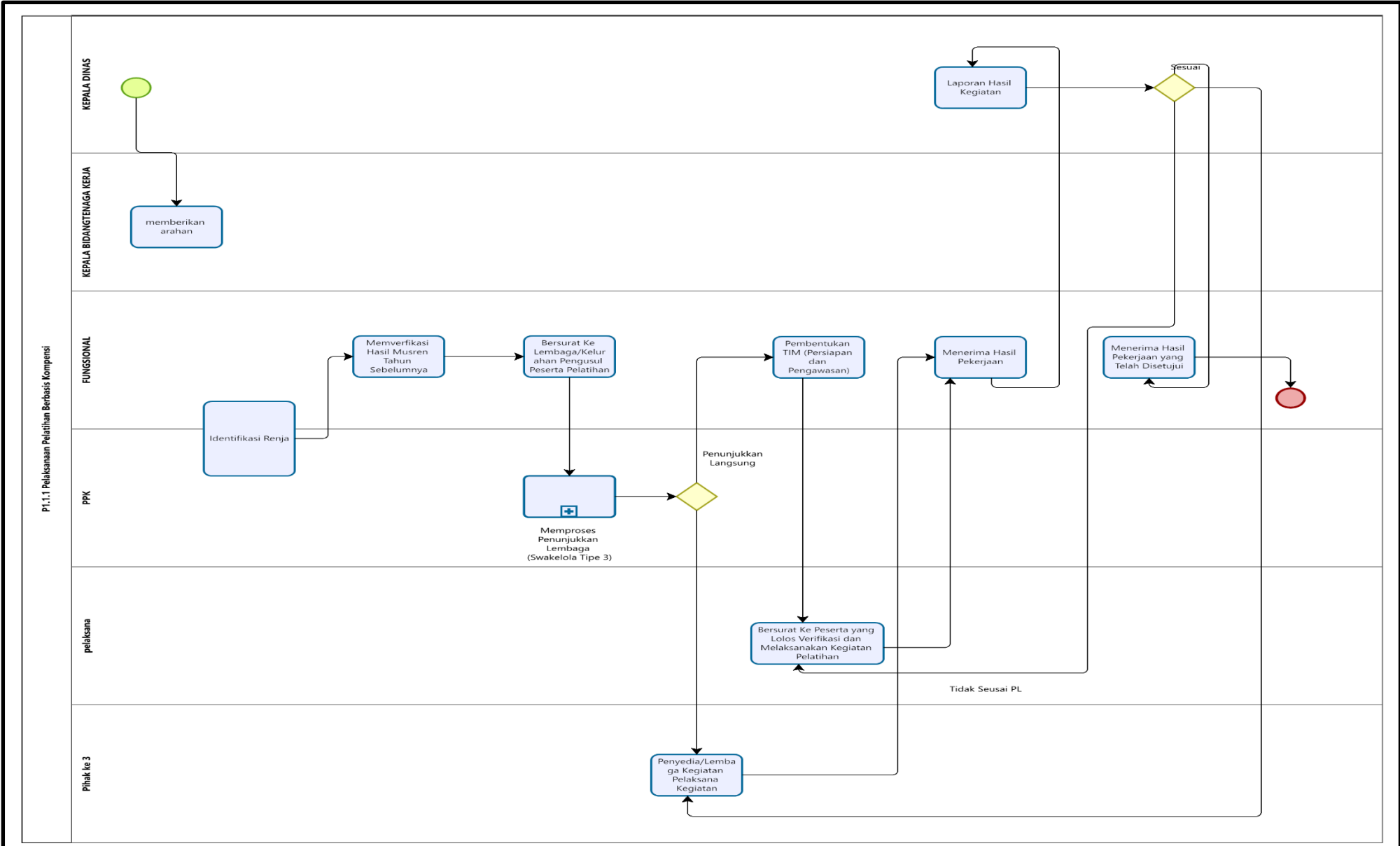


Koordinasi dan
Mediasi Upah dan
HI

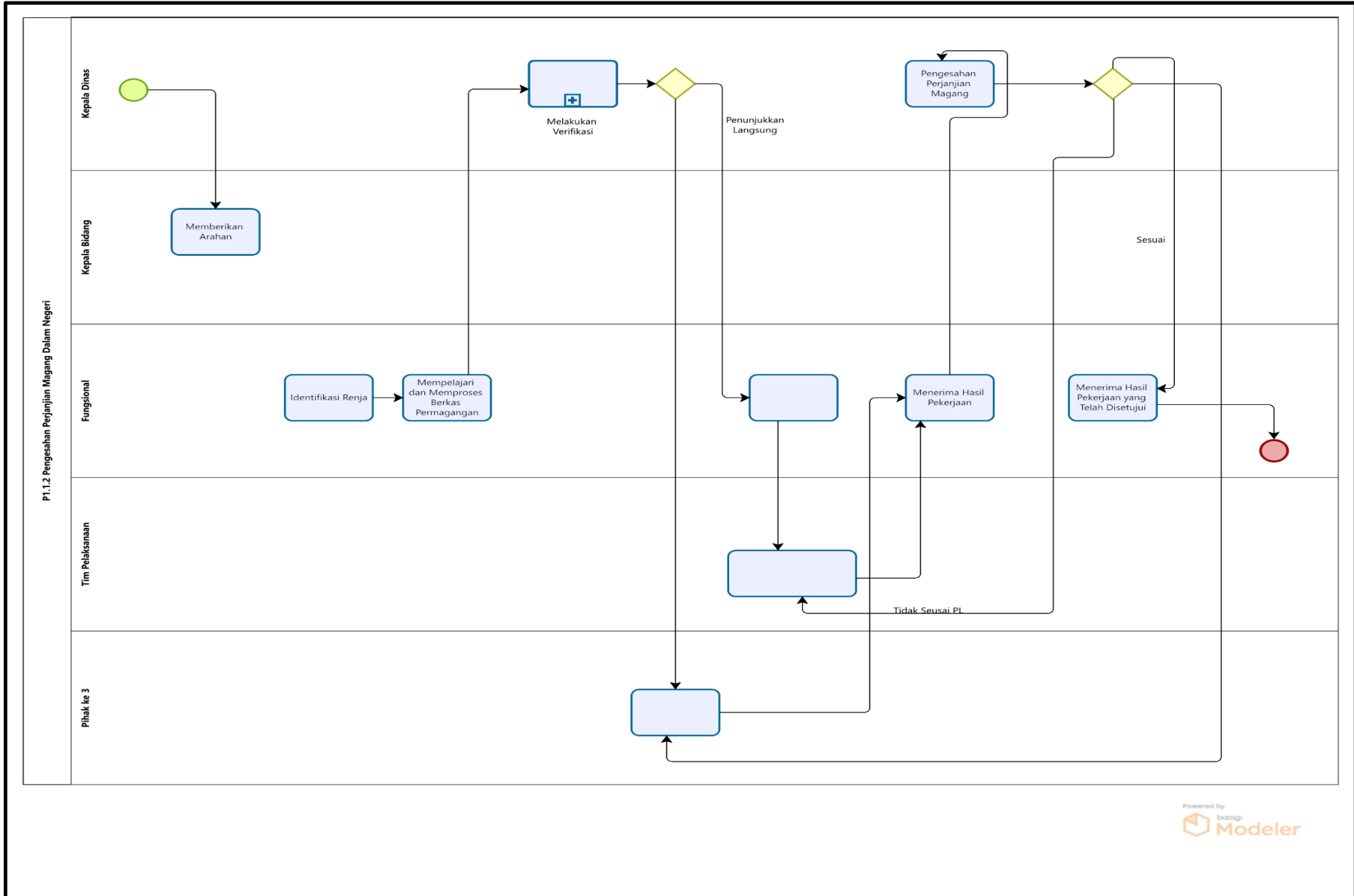


N1 KETENAGAKERJAAN

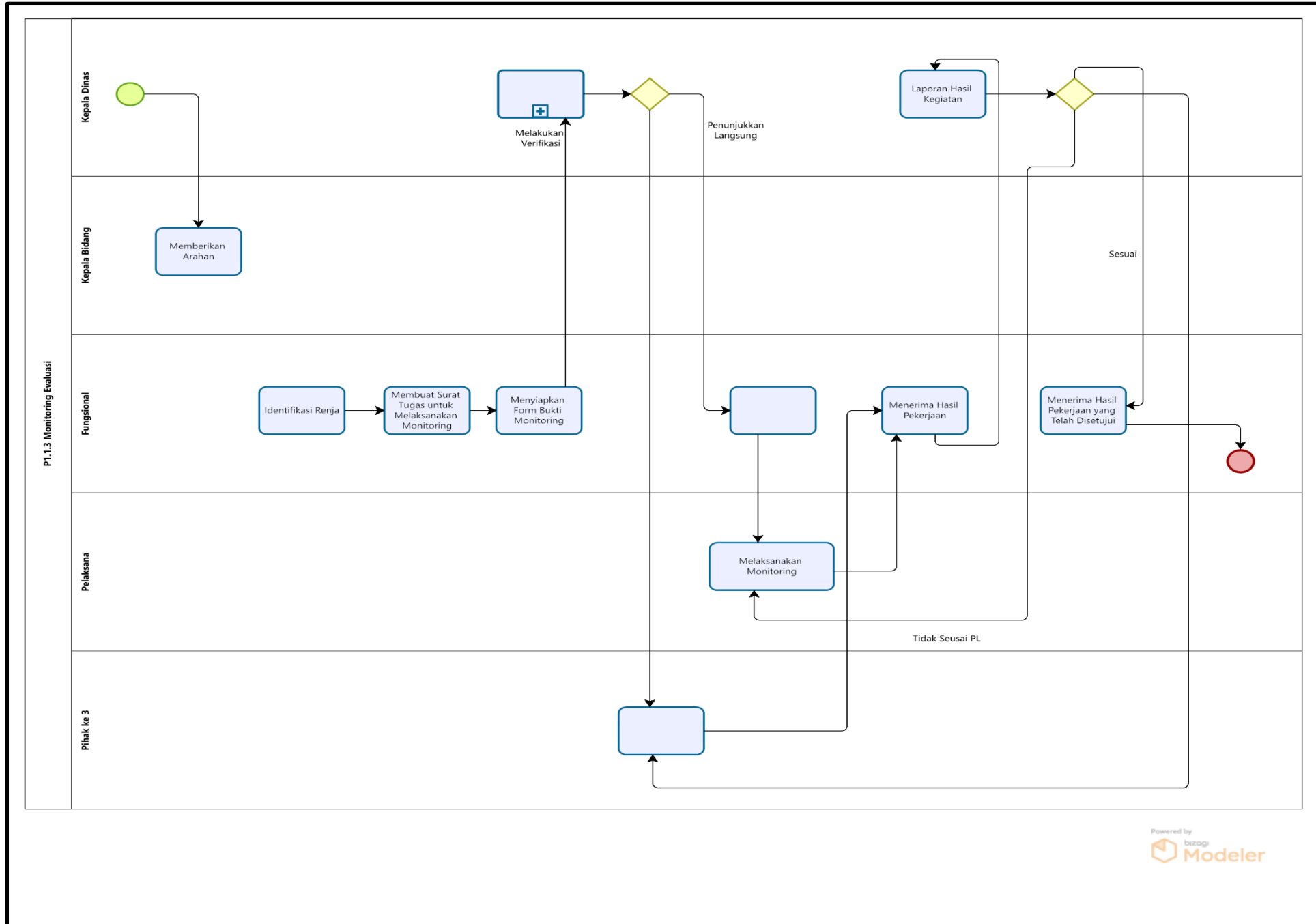
N1.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi



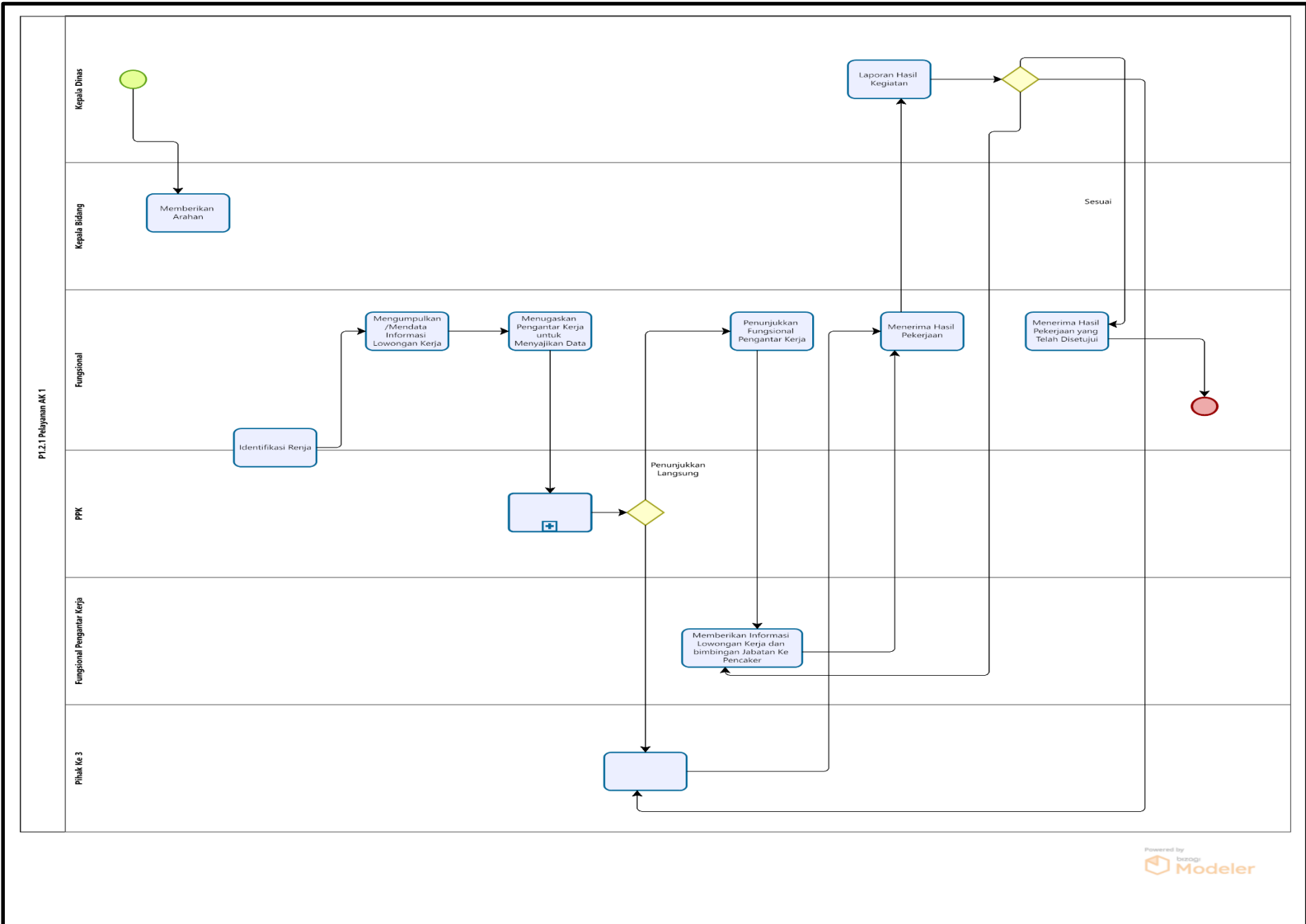
N1.1.2 Pengesahan Perjanjian Magang Dalam Negeri



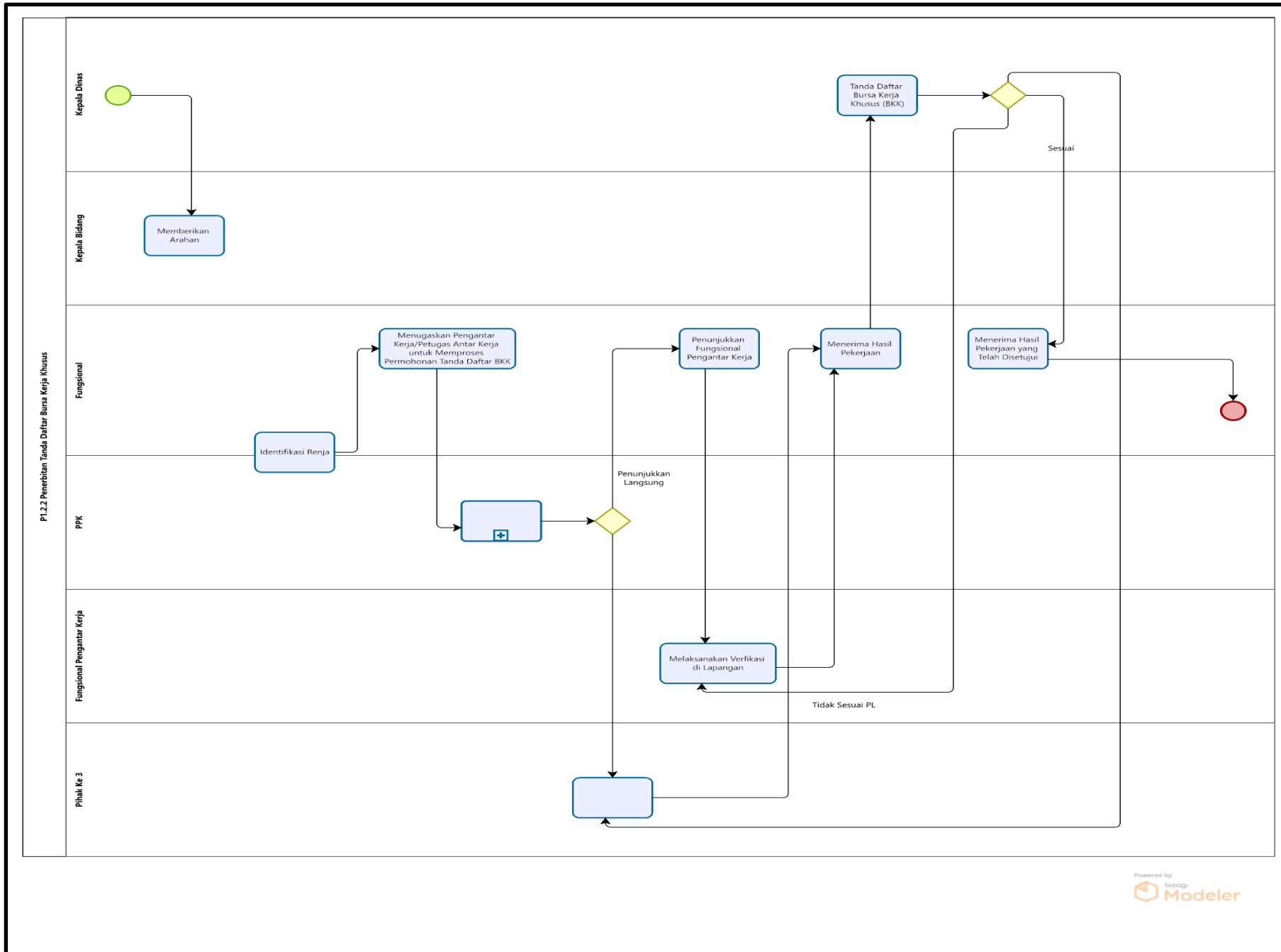
N1.1.3 Monitoring Evaluasi



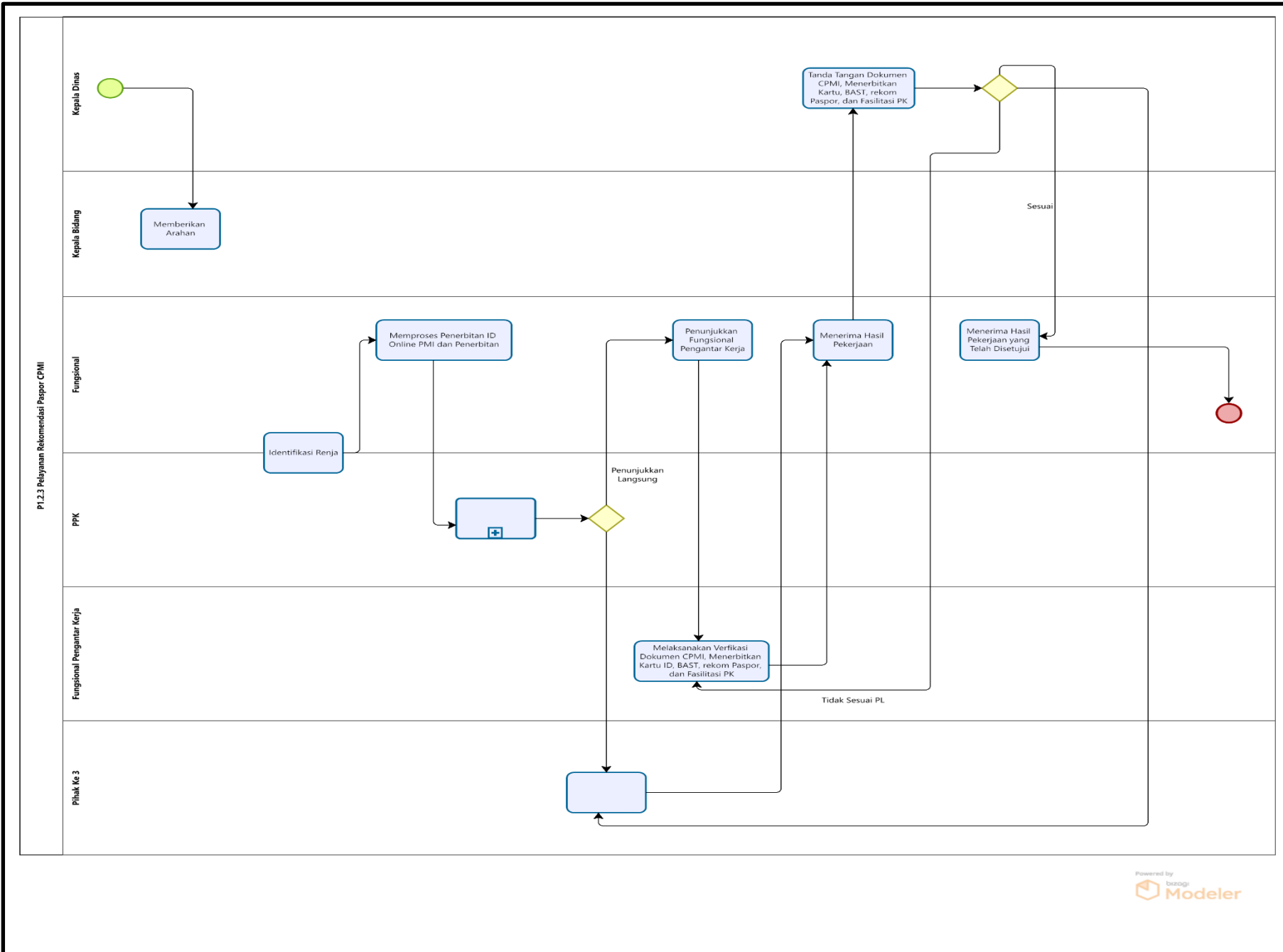
N1.2.1 Pelayanan AK 1



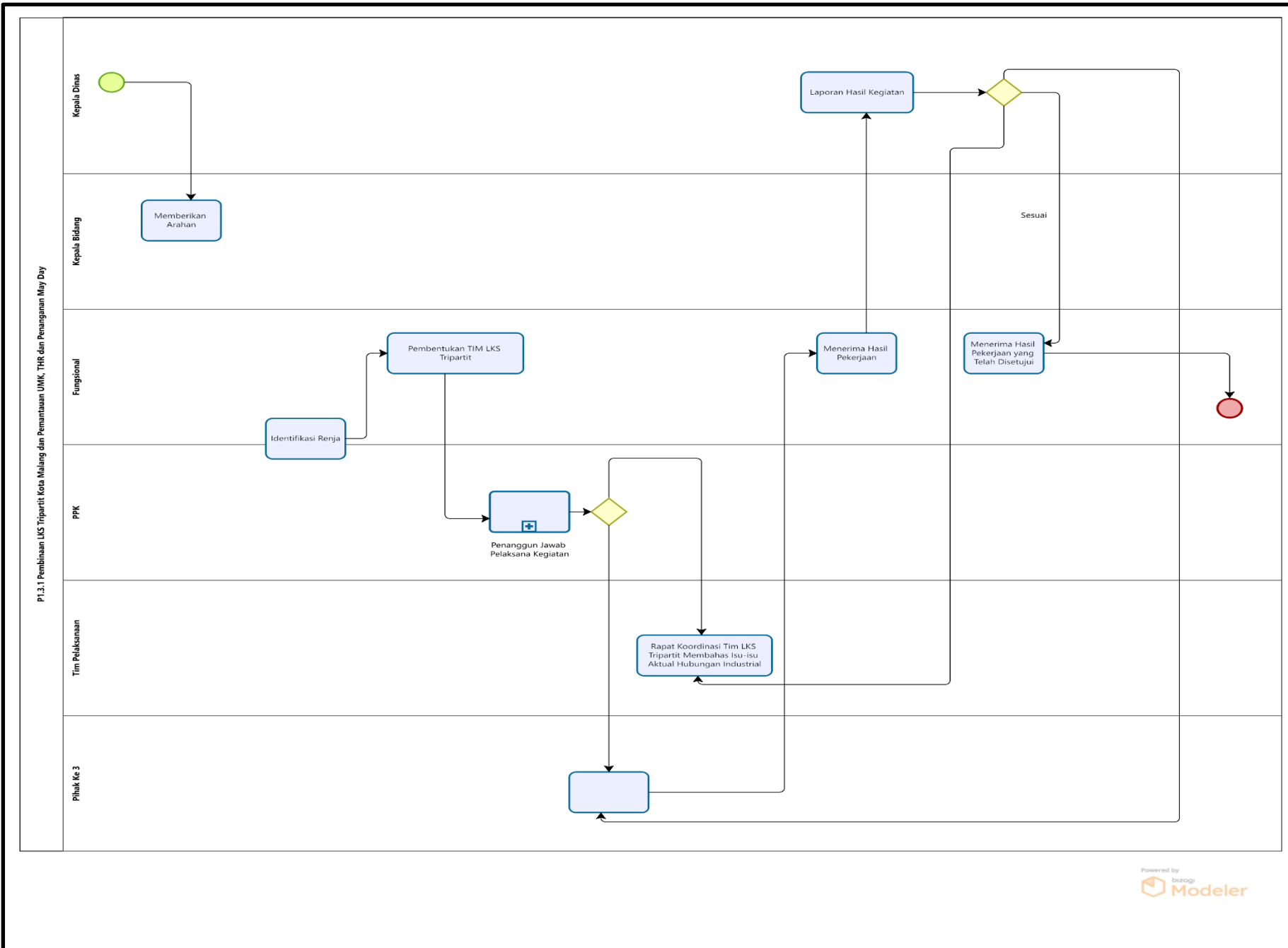
N1.2.2 Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus



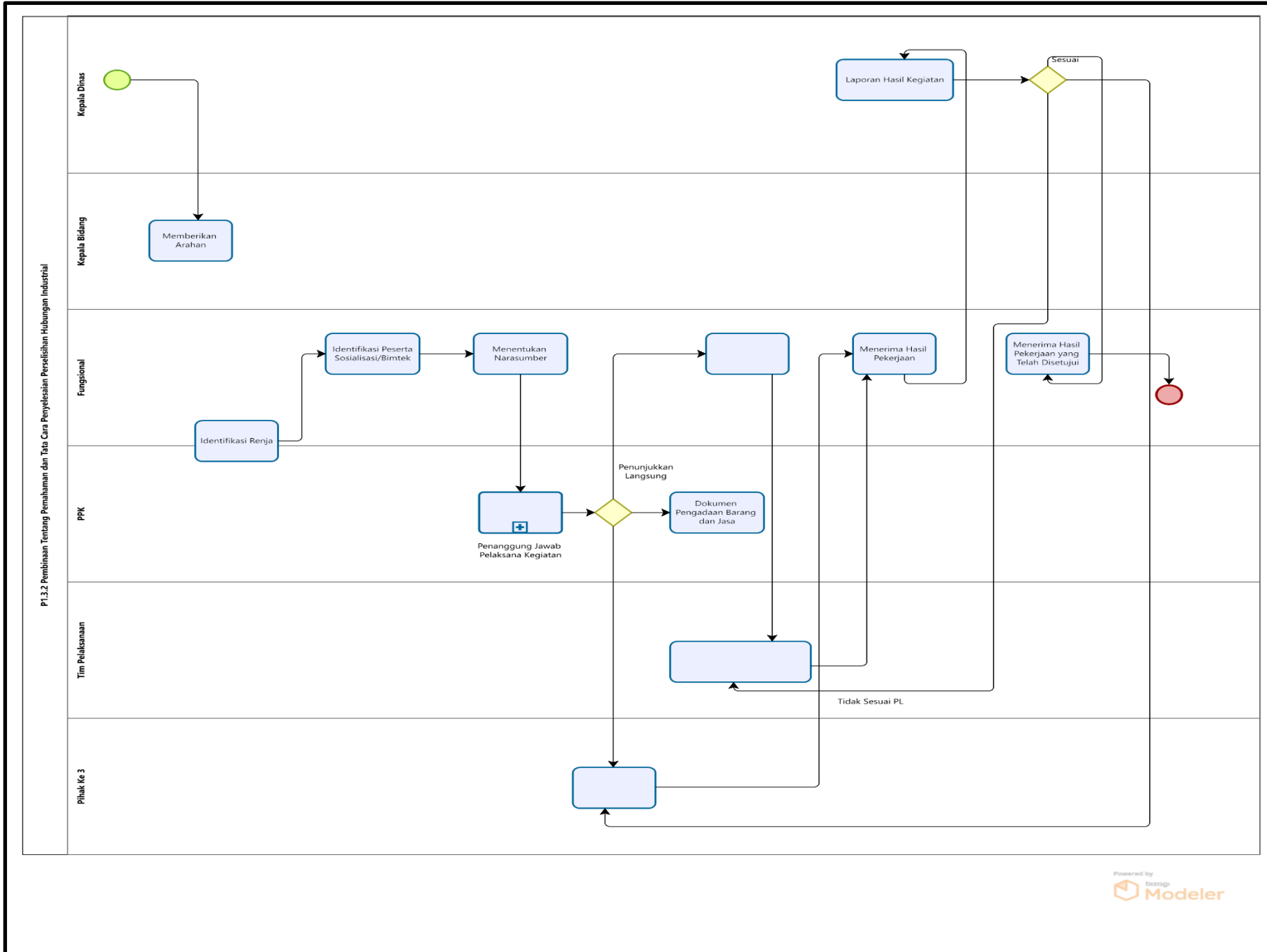
N1.2.3 Pelayanan Rekomendasi Paspor CPMI



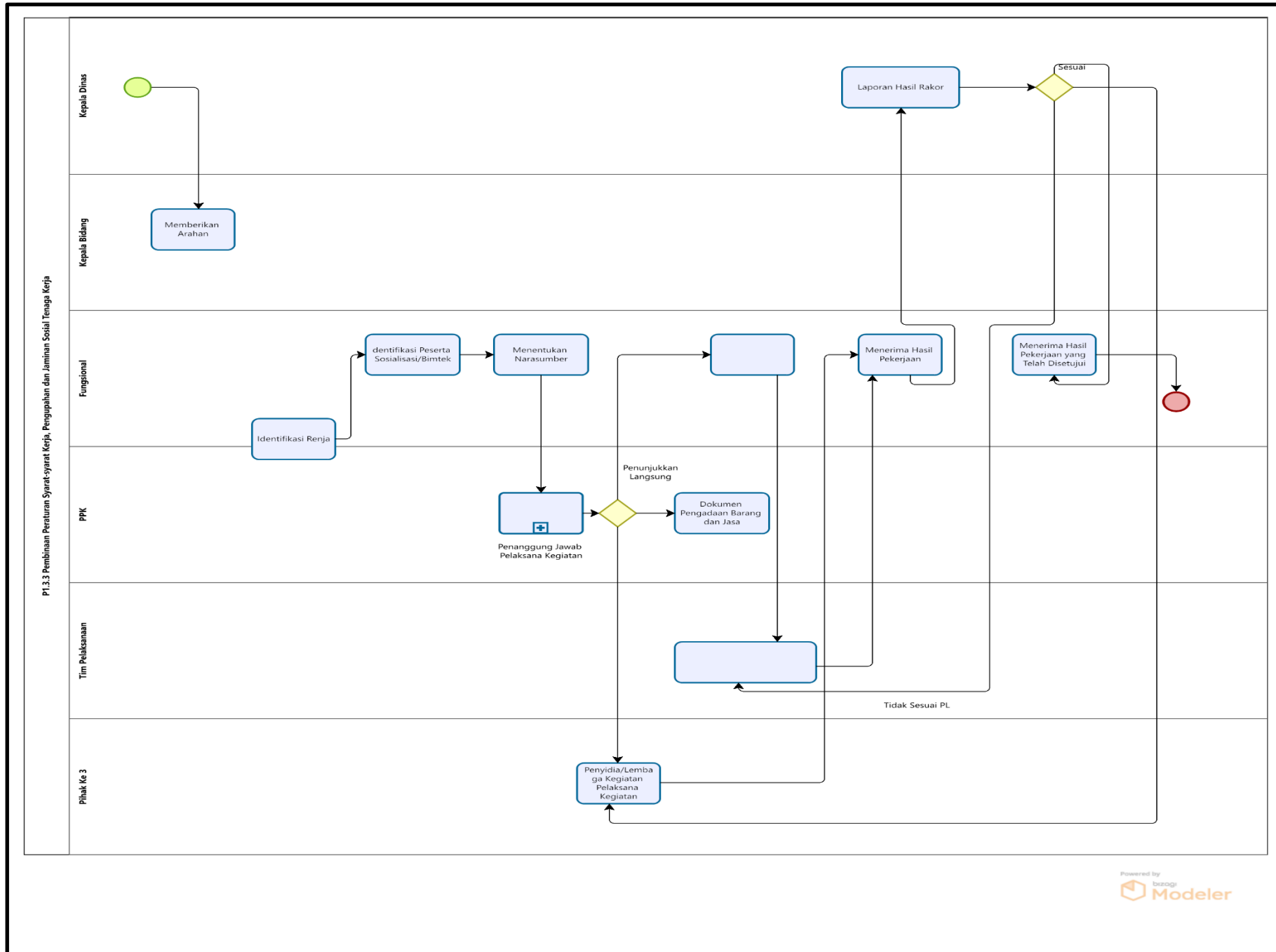
N1.3.1 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK, THR dan Penanganan May Day



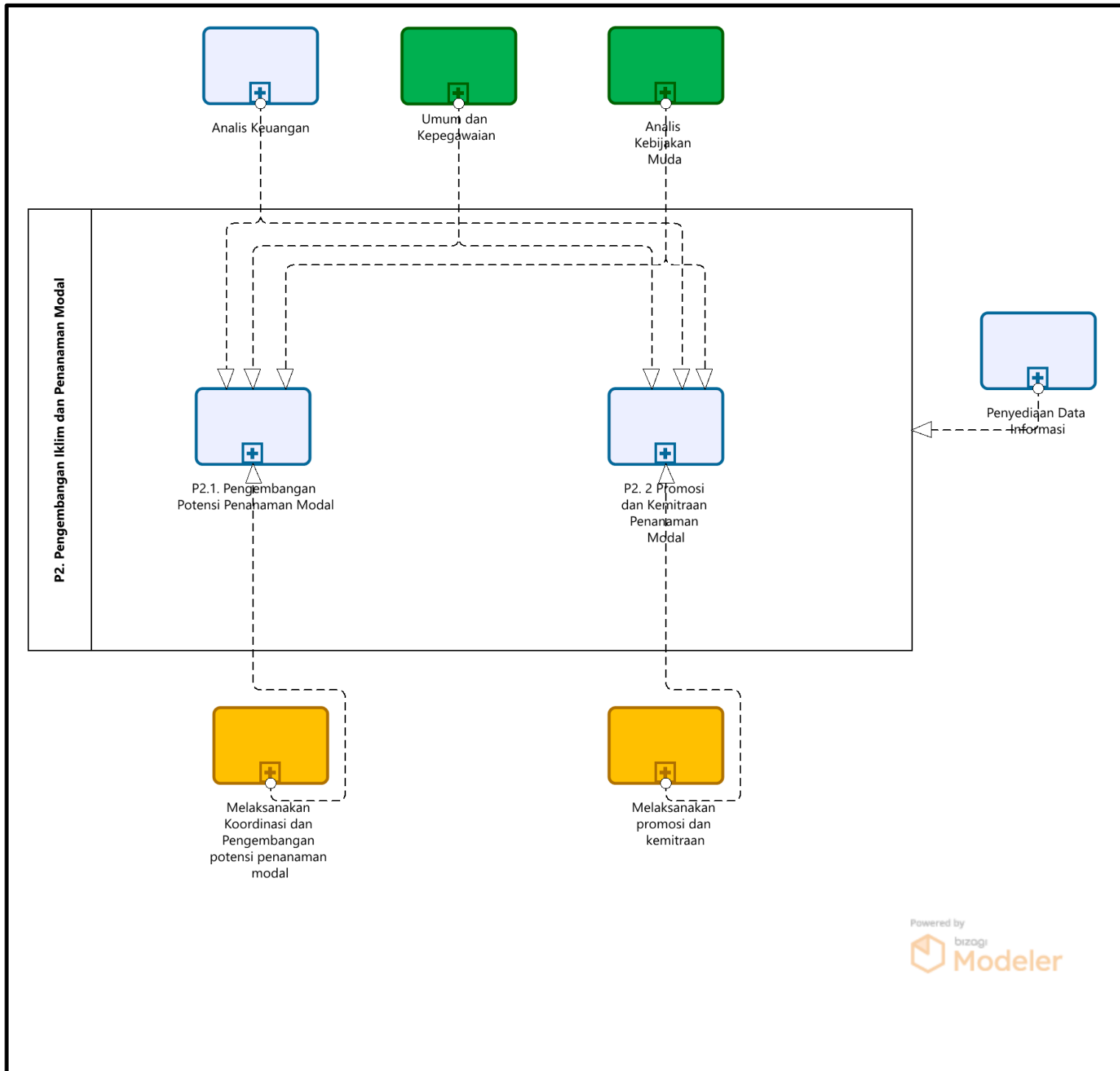
N1.3.2 Pembinaan Tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



N1.3.3 Pembinaan Peraturan Syarat-syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



**P2 PENGEMBANGAN IKLIM
DAN PENANAMAN MODAL**

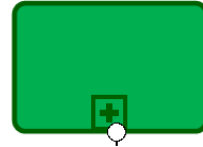




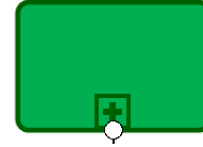
Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal



Analisis Keuangan



Umum dan Kepegawaian



Analisis Kebijakan Muda



P2. 1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal

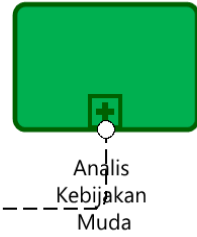
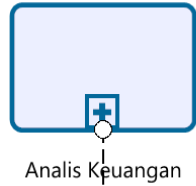


P2.1.1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal

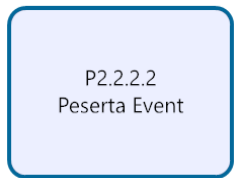
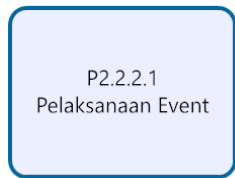
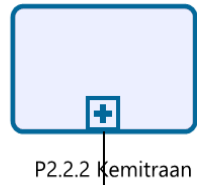


Metaksanakan Koordinasi dan Pengembangan potensi penanaman modal



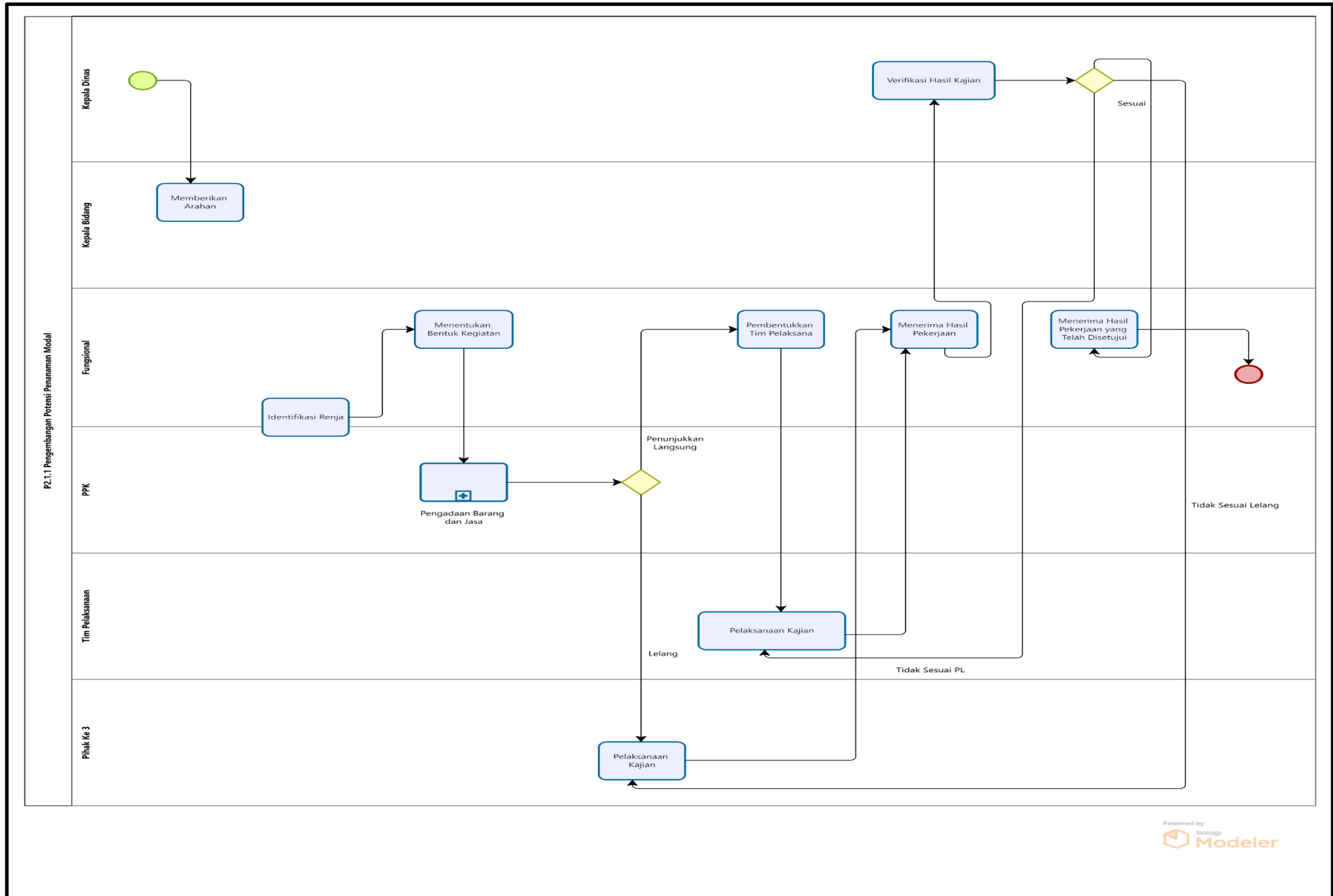


P2. 2 Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal

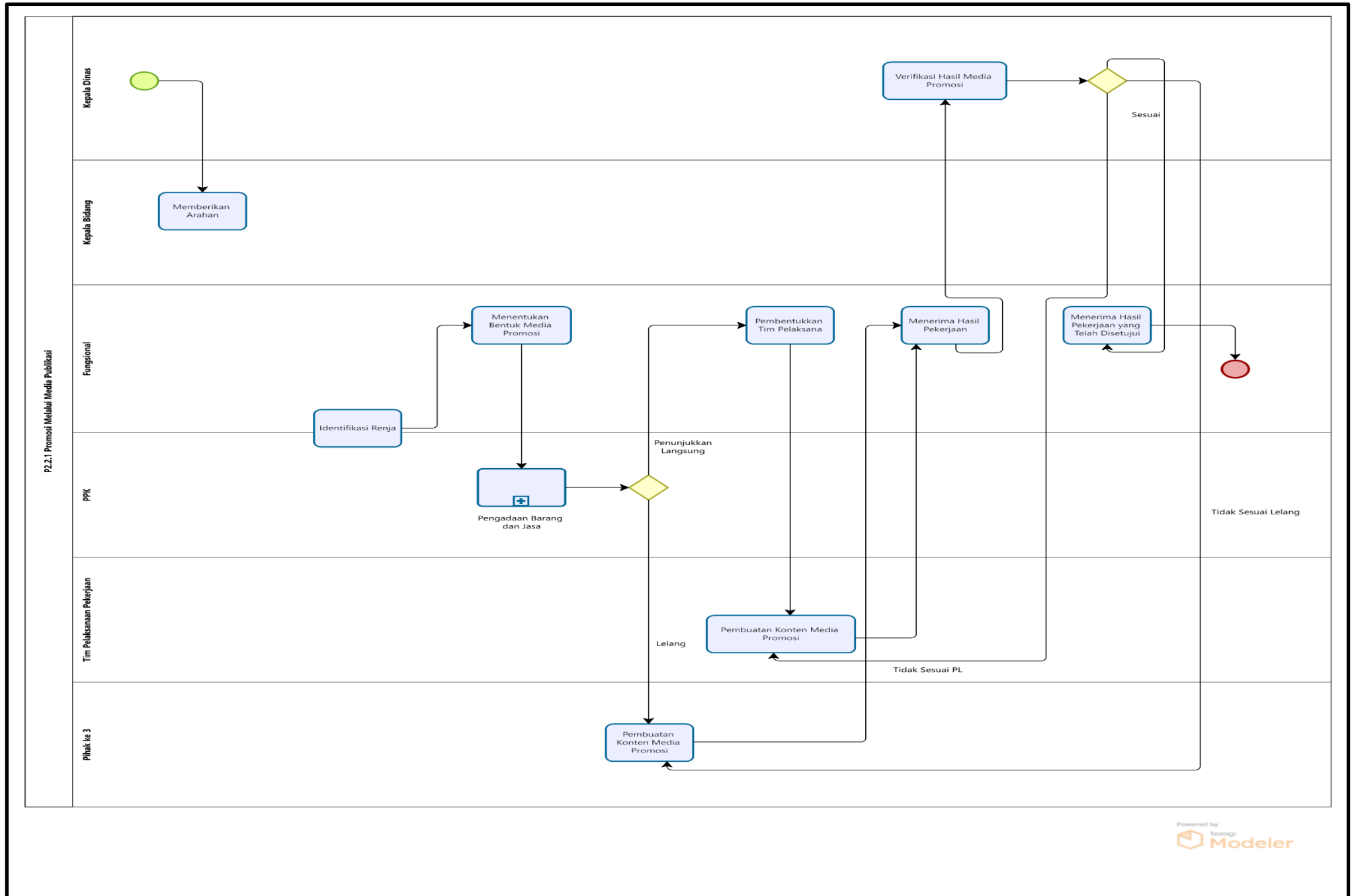


N2 PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENANAMAN MODAL

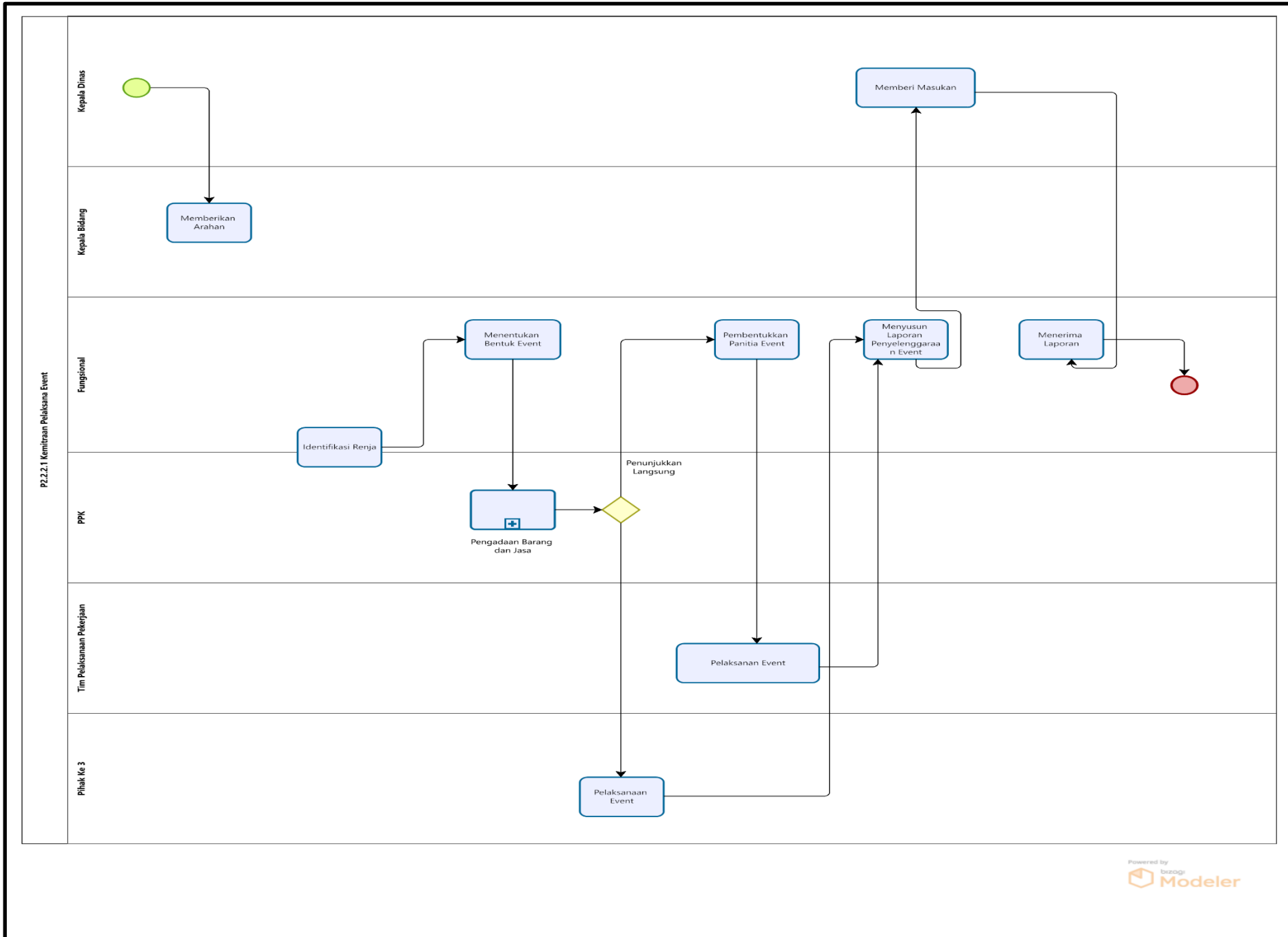
N2.1.1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal



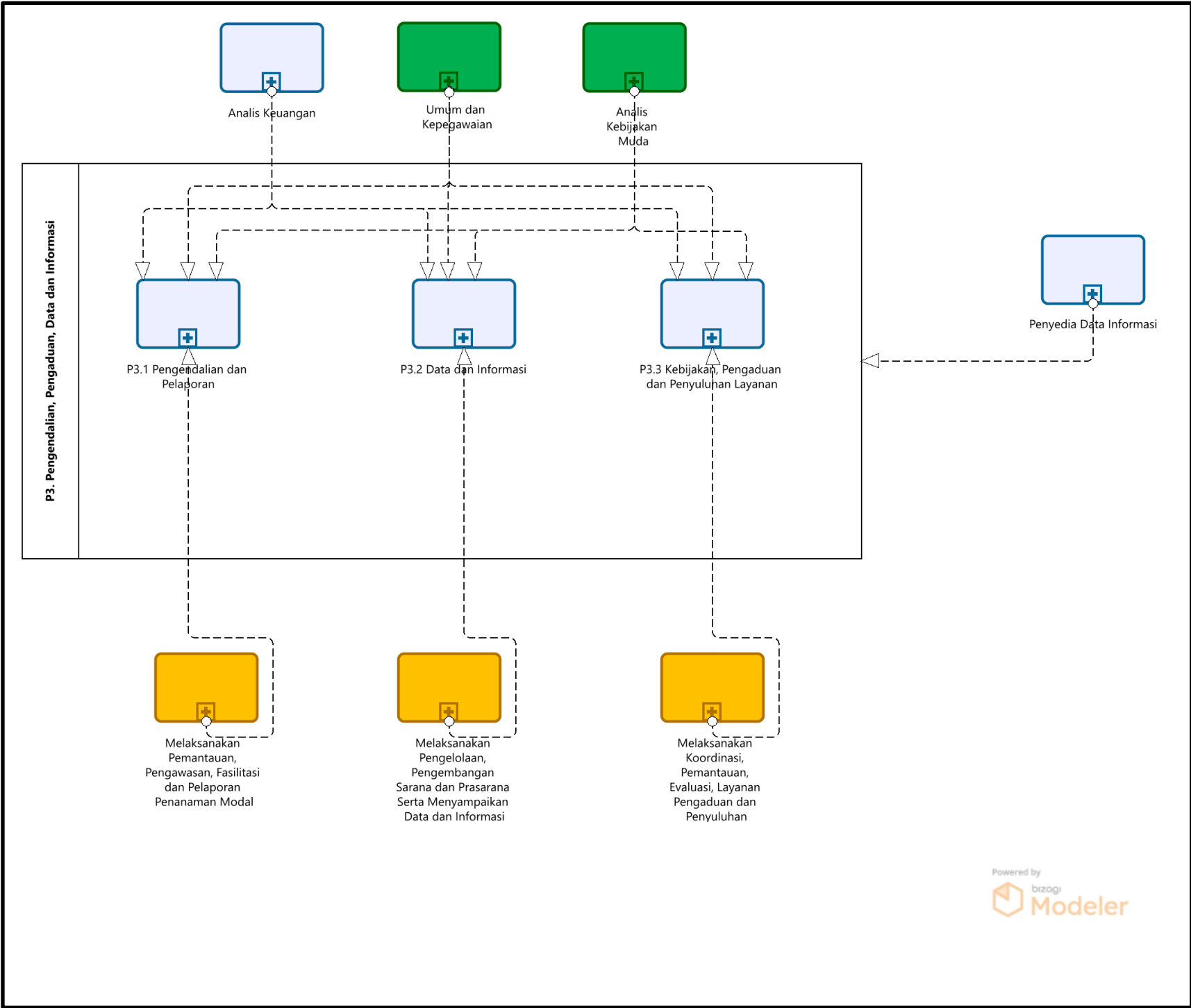
N2.2.1 Promosi Melalui Media Publikasi

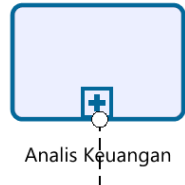


N2.2.2.1 Kemitraan Pelaksana Event

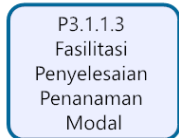
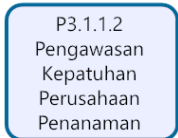
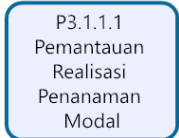


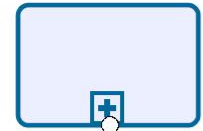
**P3 PENGENDALIAN,
PENGADUAN, DATA DAN
INFORMASI**





P3.1 Pengendalian dan Pelaporan





Pengendalian,
Pengaduan, Data dan
Informasi



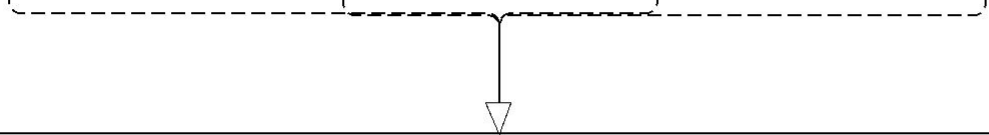
Analisis Keuangan



Umum dan
Kepegawaian



Analisis
Kebijakan
Muda



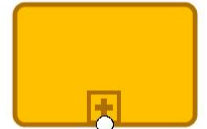
P3.2 Data dan Informasi



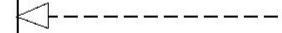
P3.2.1 Pengelolaan Data

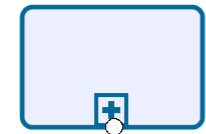


P3.2.2 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi



Melaksanakan
Pengelolaan,
Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Serta Menyampaikan
Data dan Informasi

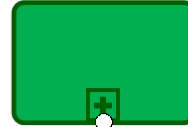




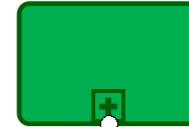
Pengendalian,
Pengaduan, Data dan
Informasi



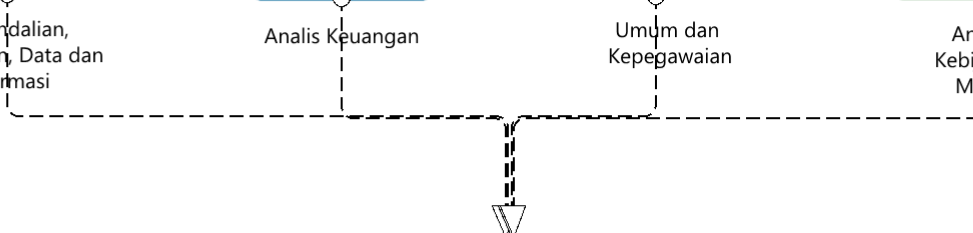
Analisis Keuangan



Umum dan
Kepegawaian



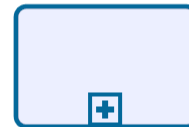
Analisis
Kebijakan
Muda



P.3.3 Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan



P3.3.1 Pengelolaan
Layanan Pengaduan
Masyarakat



P3.3.2 Pembinaan dan
Penyuluhan Layanan

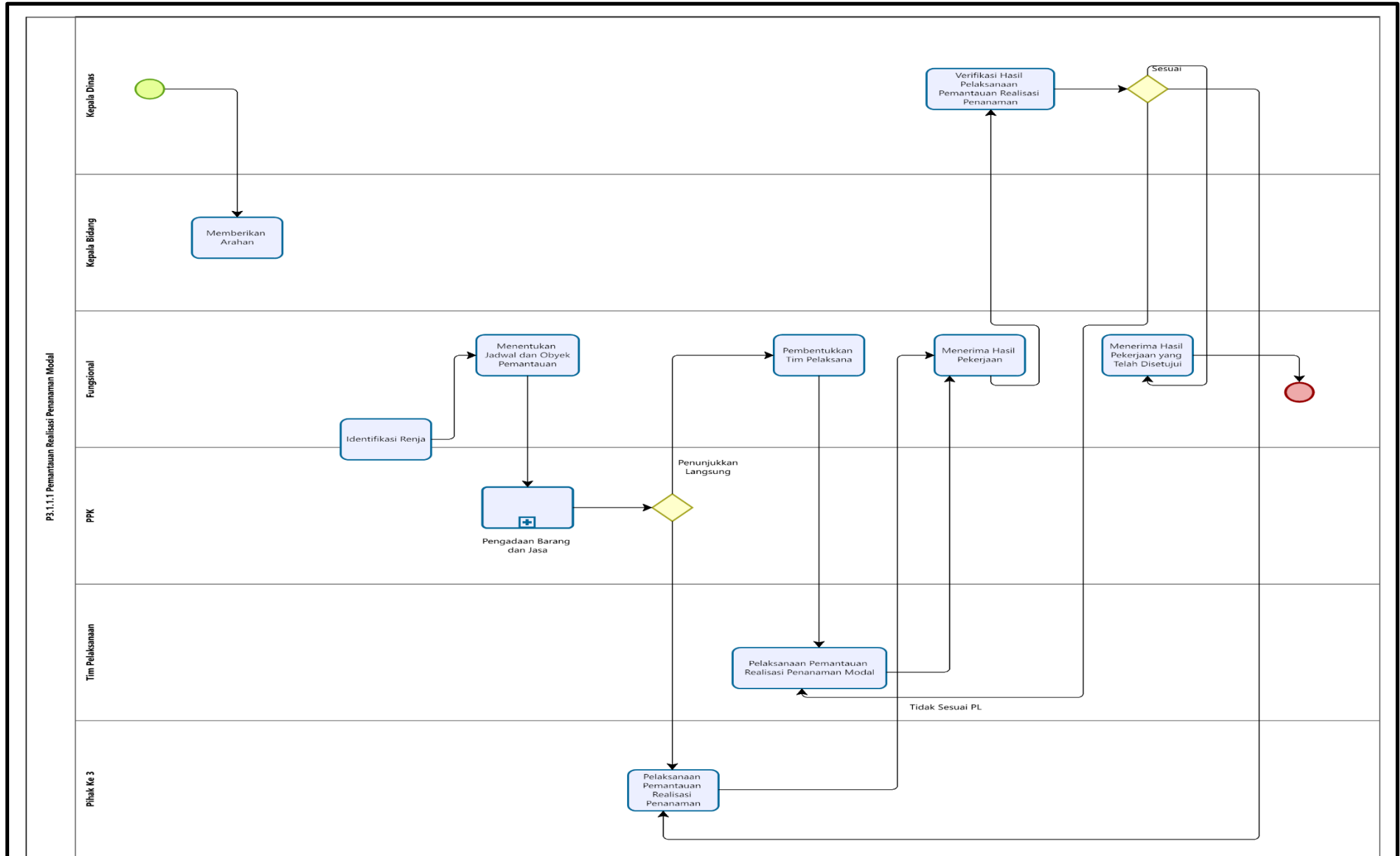


Melaksanakan
Koordinasi,
Pemantauan,
Evaluasi, Layanan
Pengaduan dan
Penyuluhan

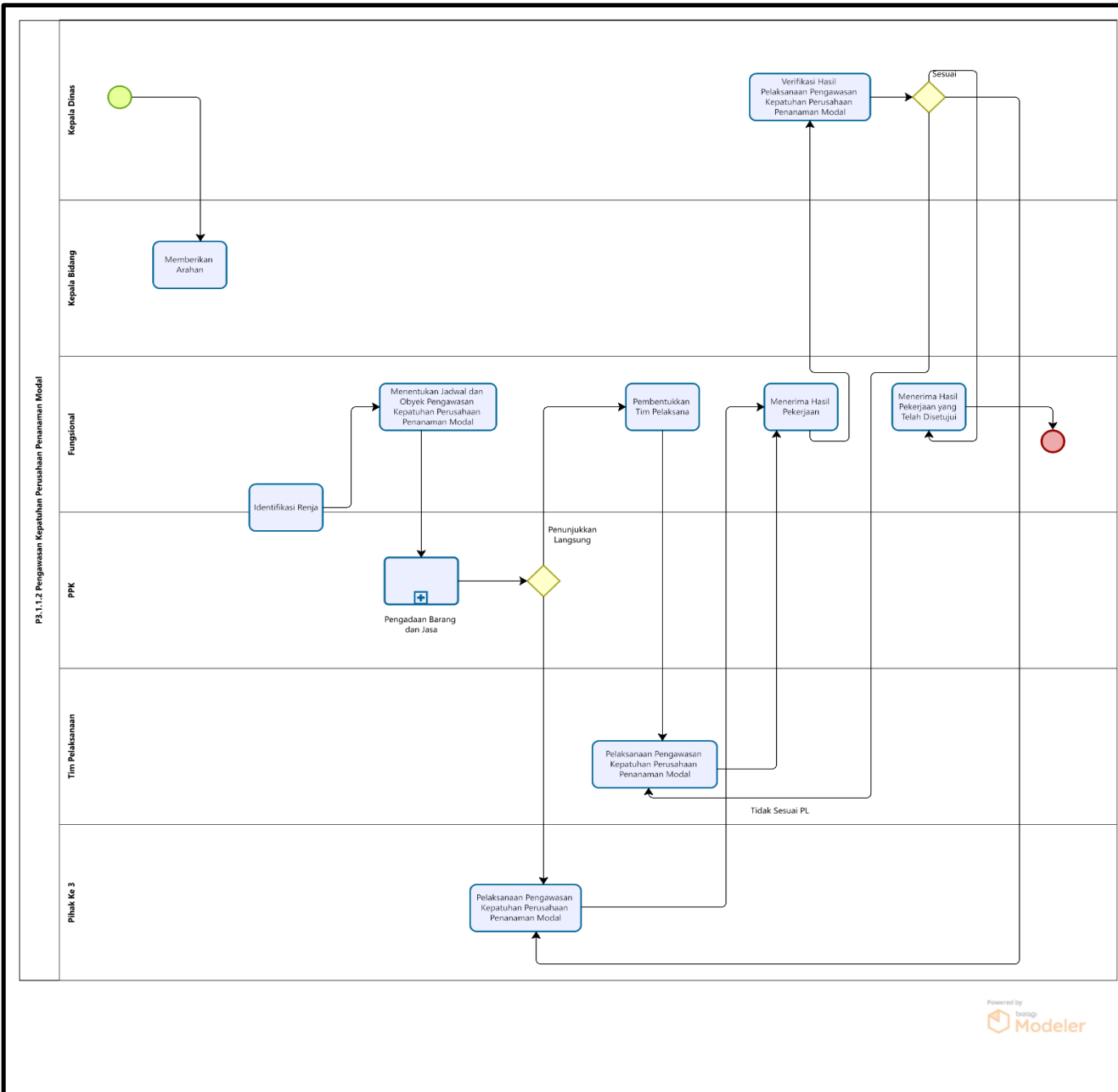


**N3 PENGENDALIAN,
PENGADUAN, DATA DAN
INFORMASI**

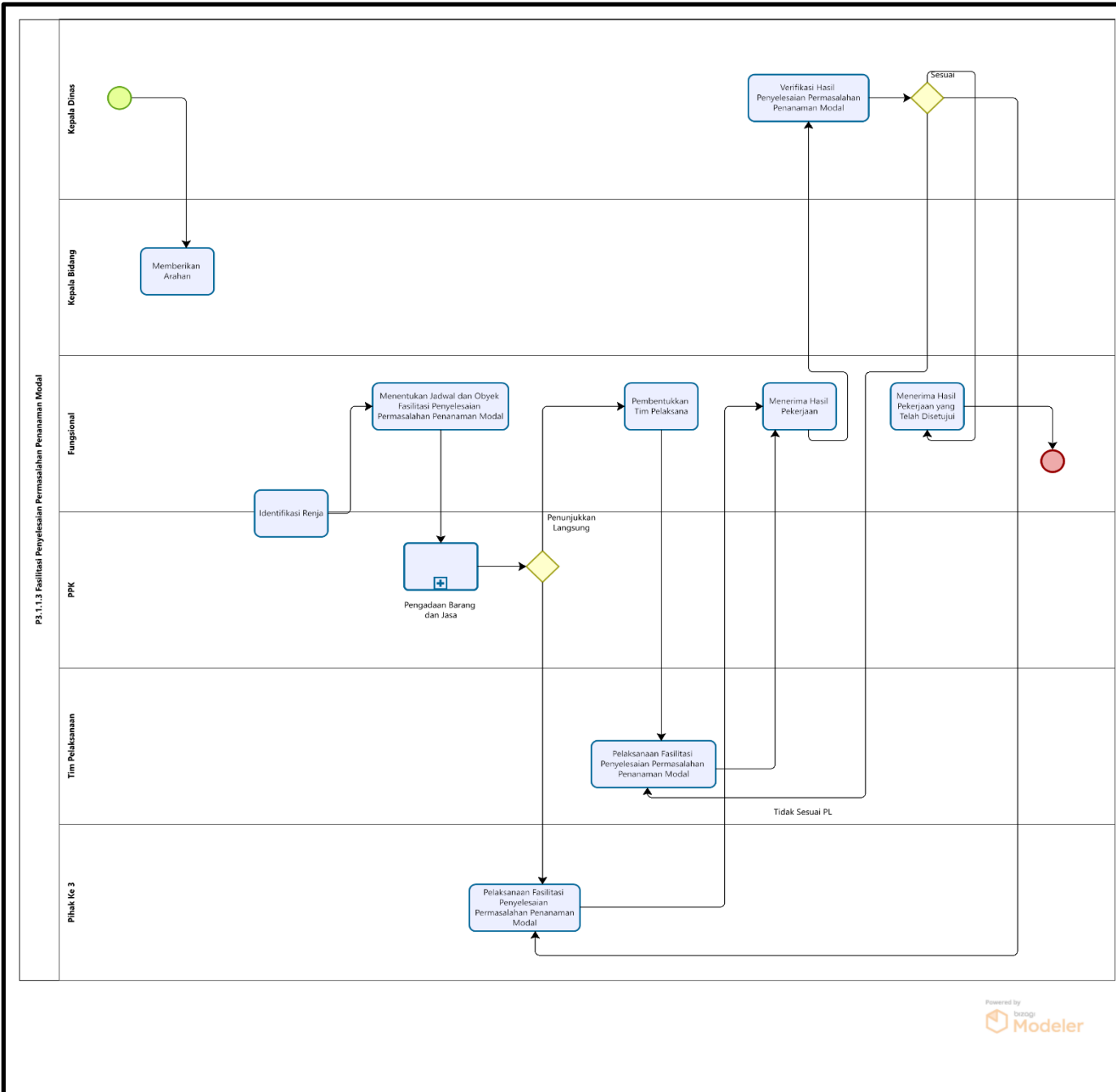
N3.1.1.1 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal



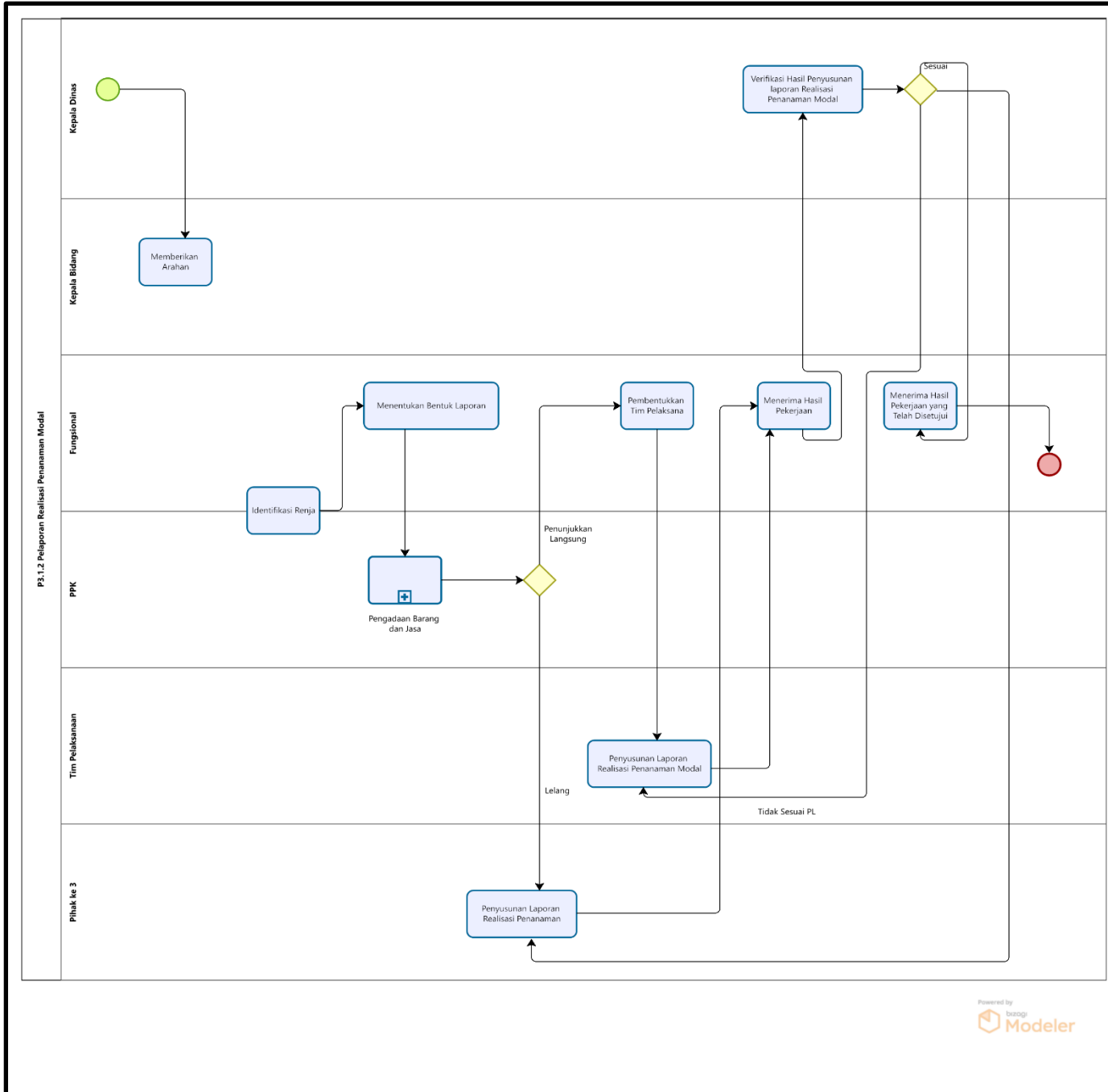
N3.1.1.2 Pengawasan Kepatuhan Perusahaan Penanaman Modal



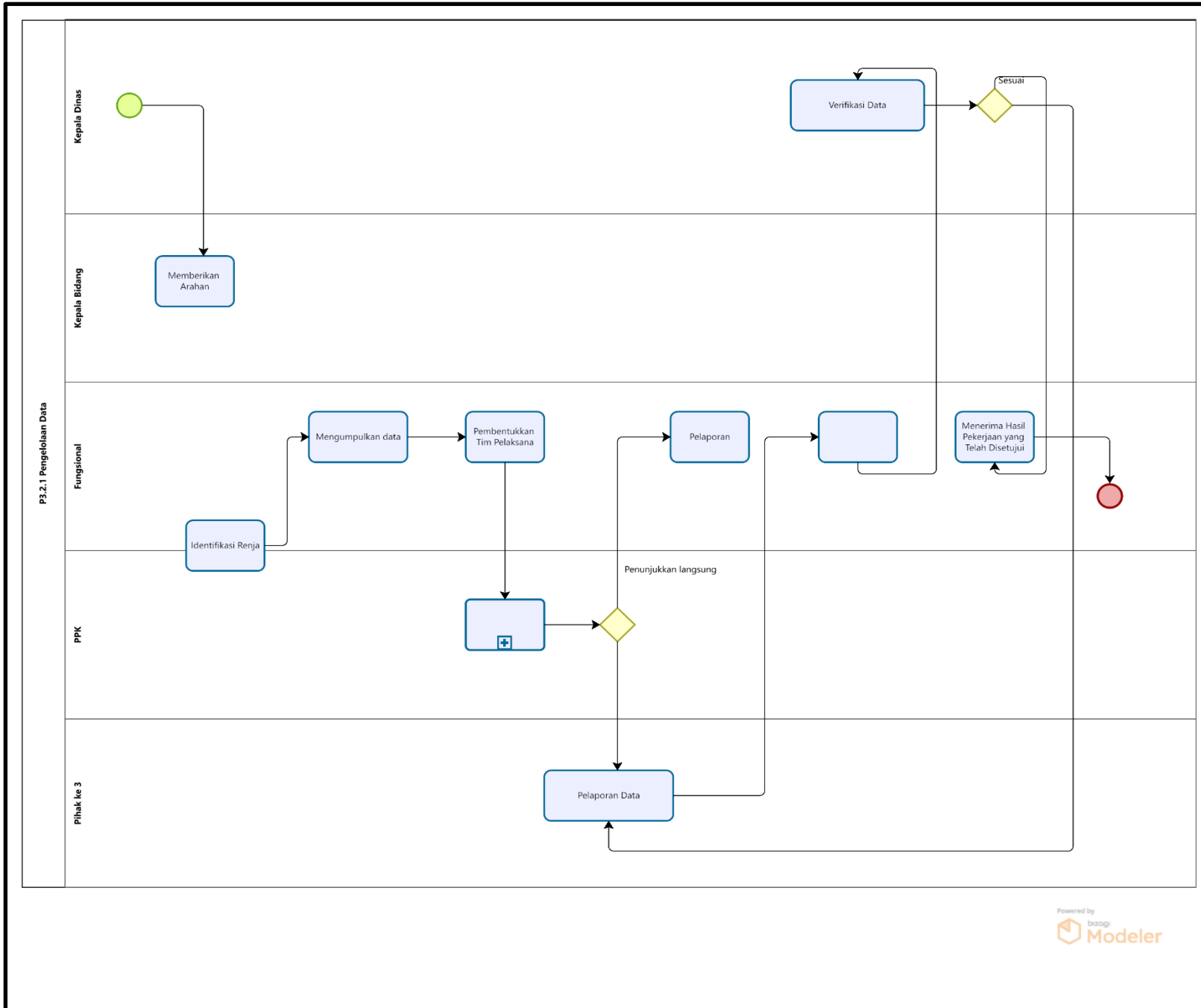
N3.1.1.3 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal



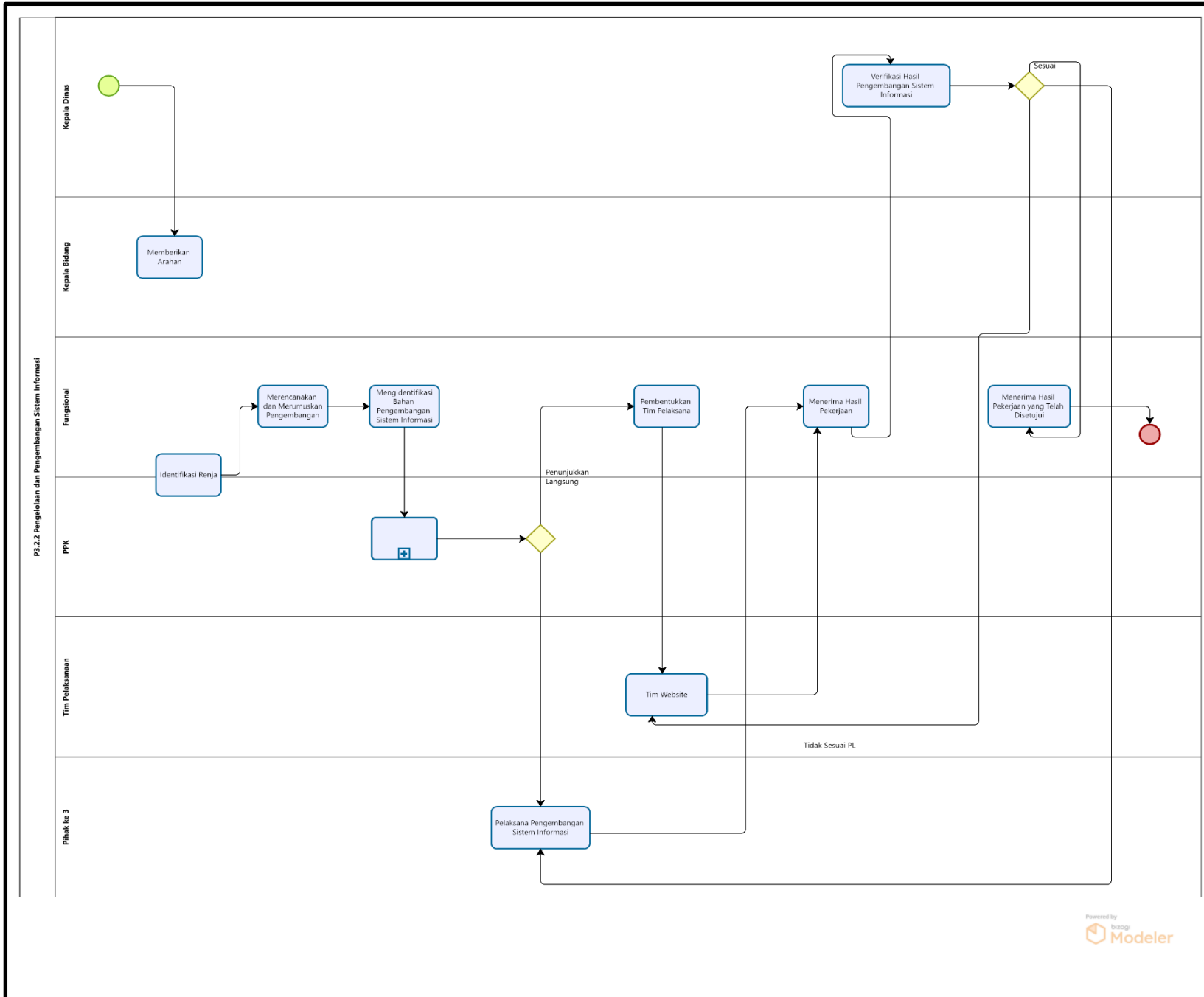
N3.1.2 Pelaporan Realisasi Penanaman Modal



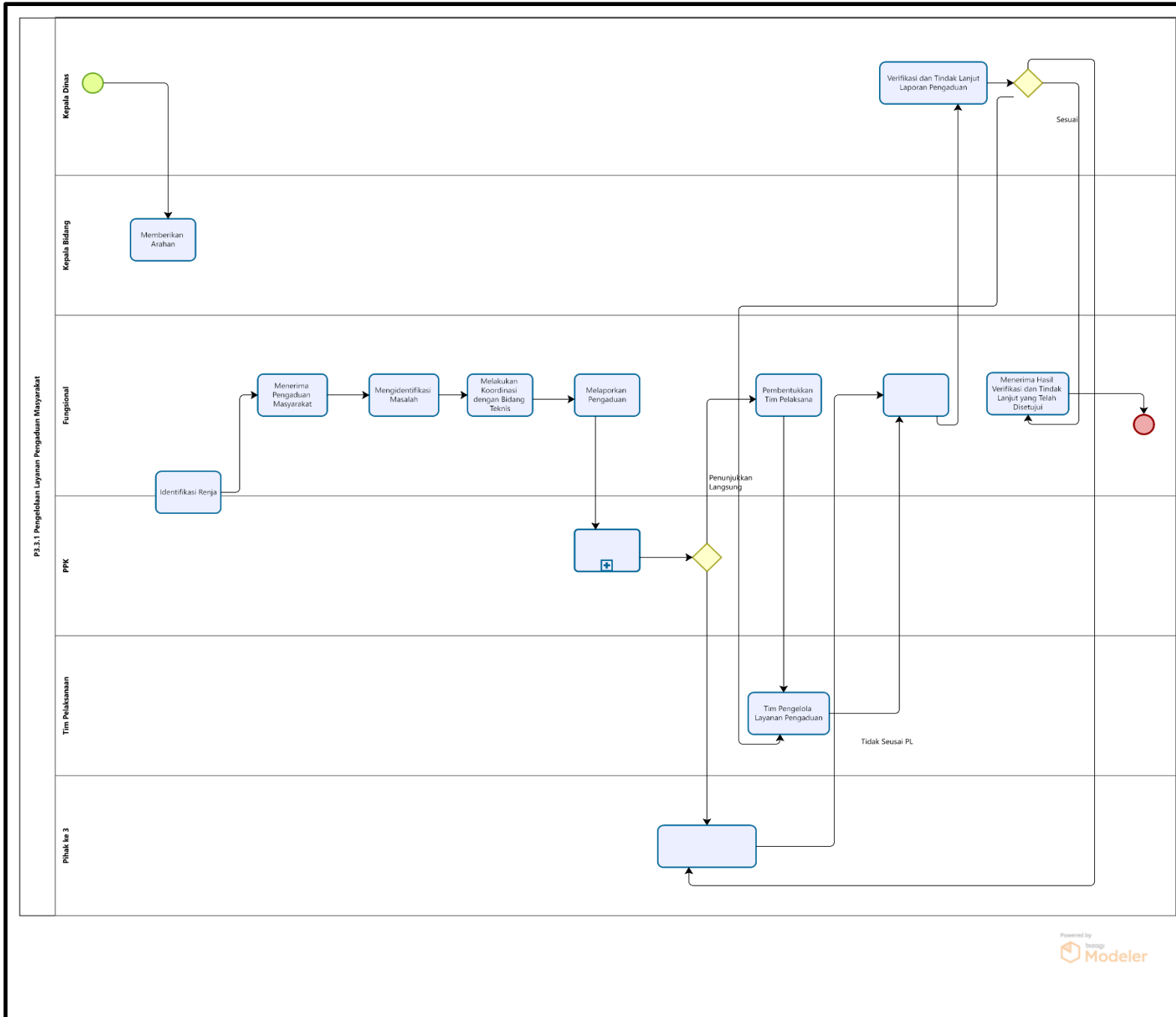
N3.2.1 Pengelolaan Data



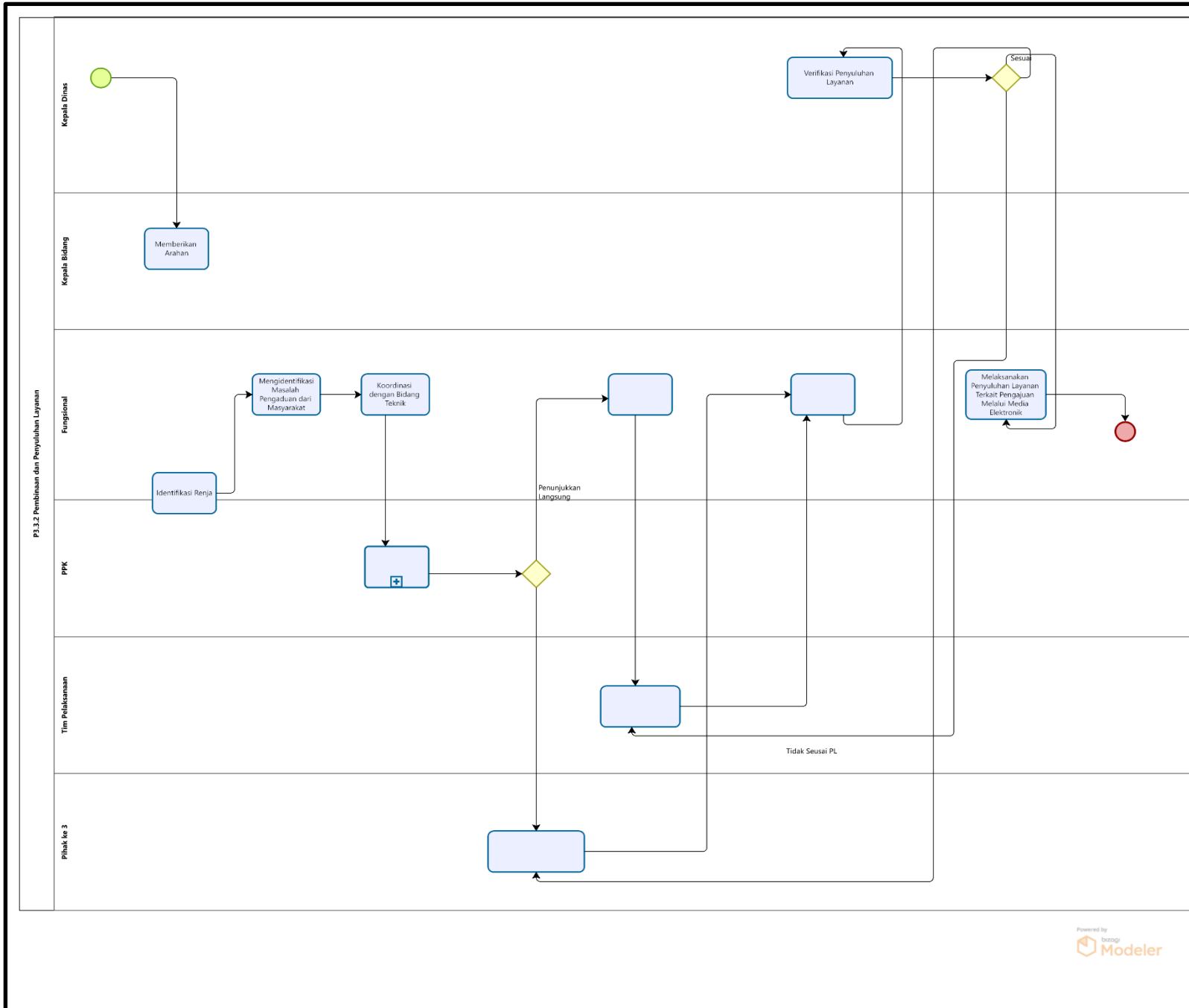
N3.2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi



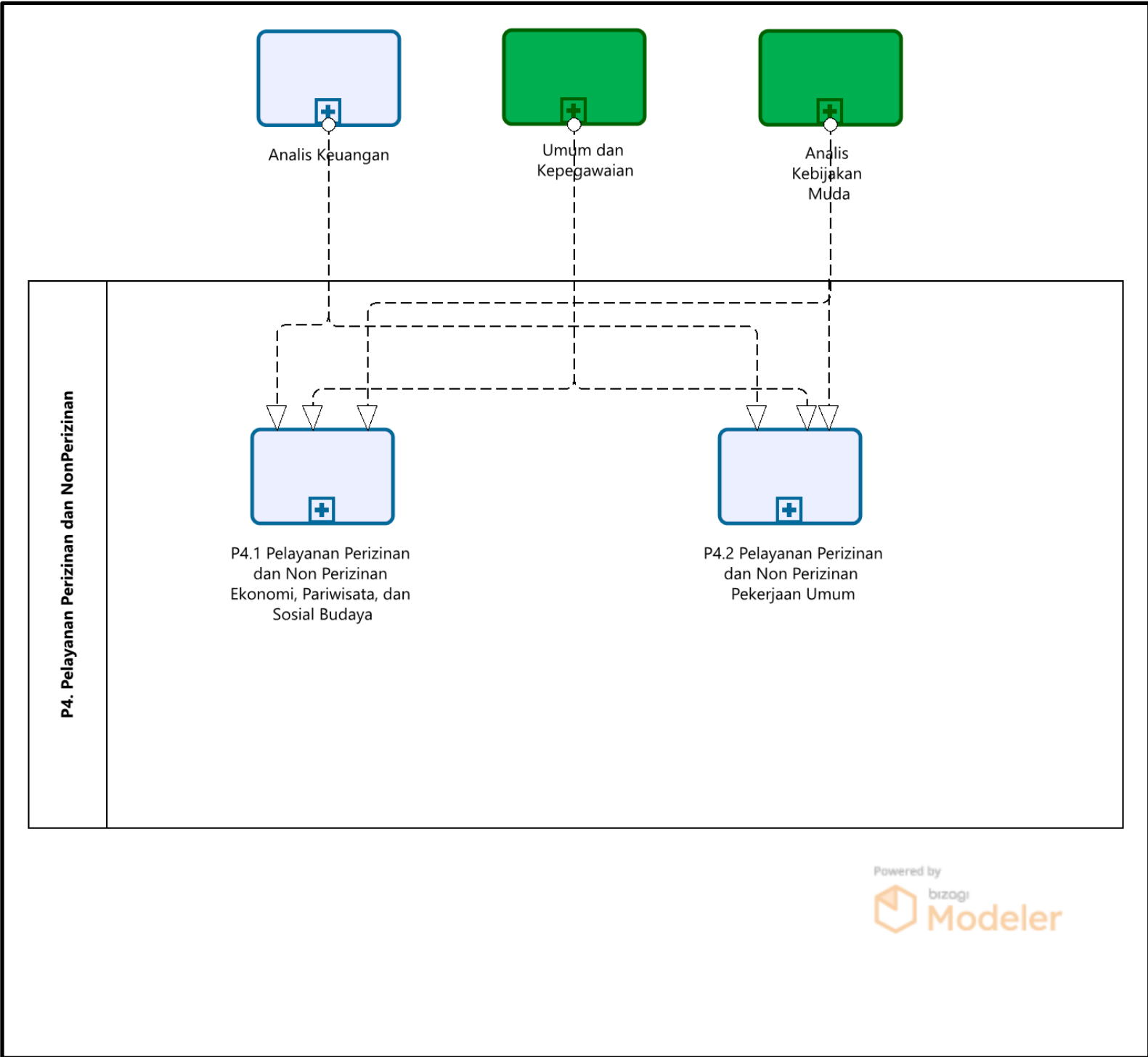
N3.3.1 Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat

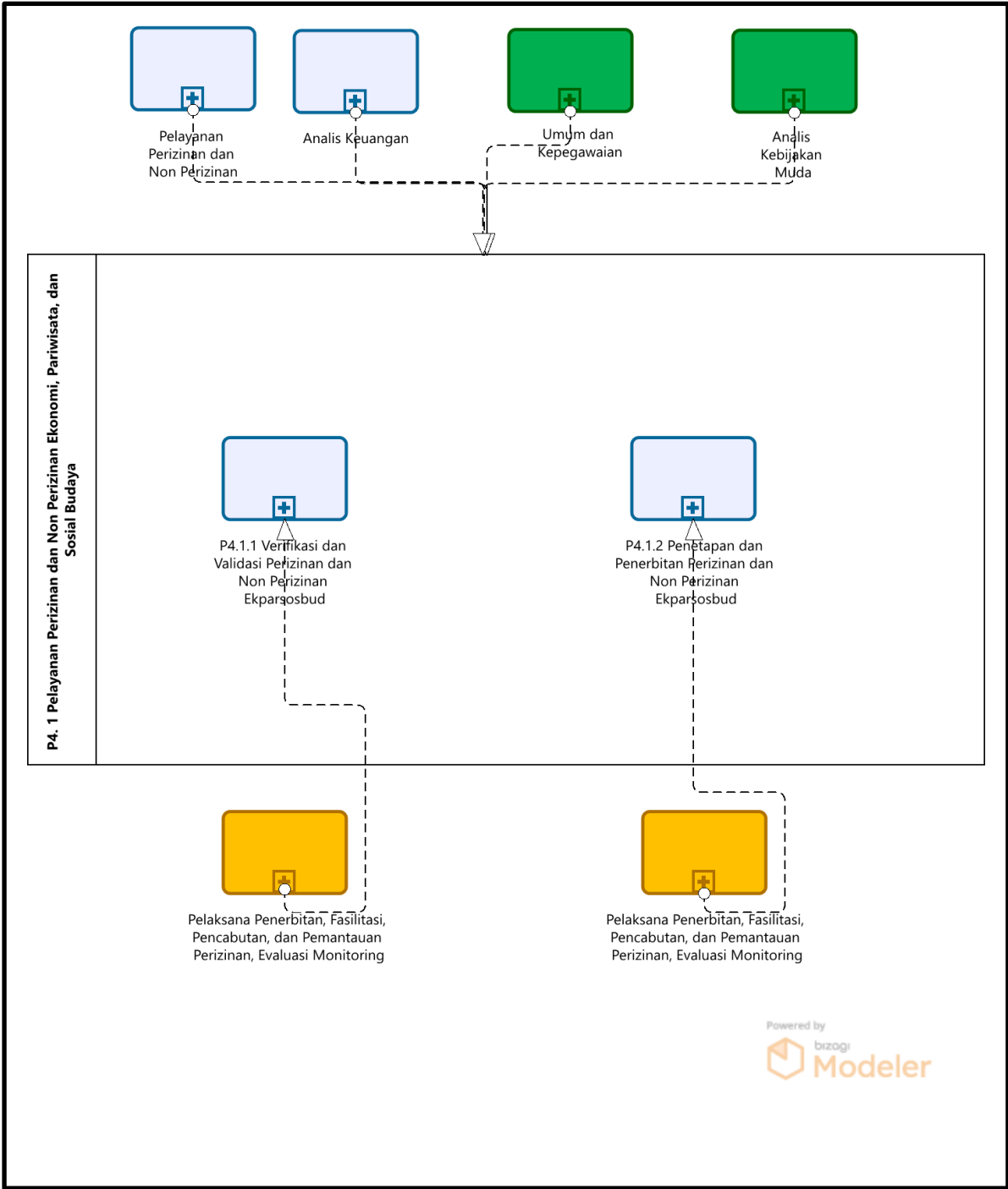


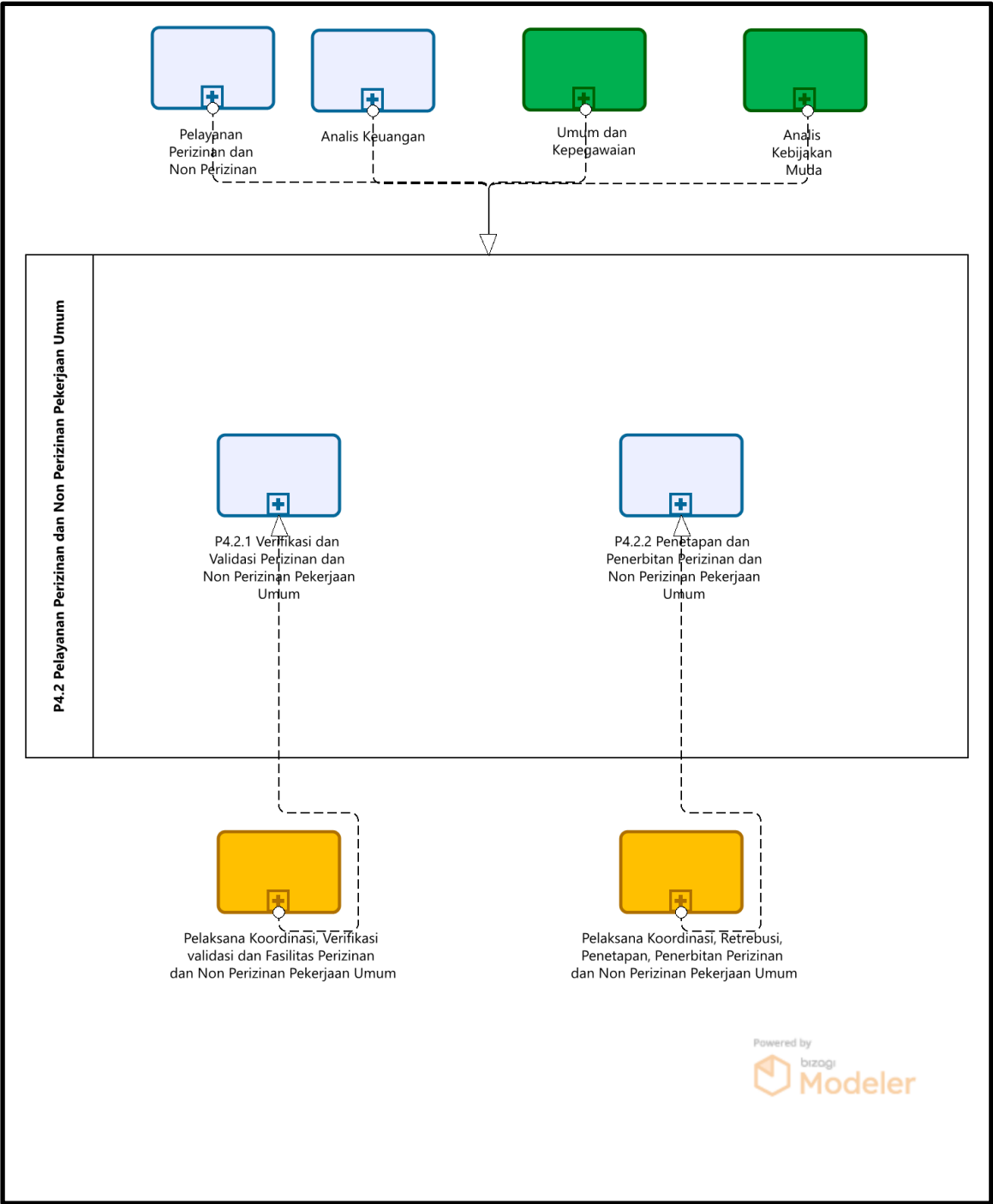
N3.3.2 Pembinaan dan Penyuluhan Layanan



**P4 PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN**

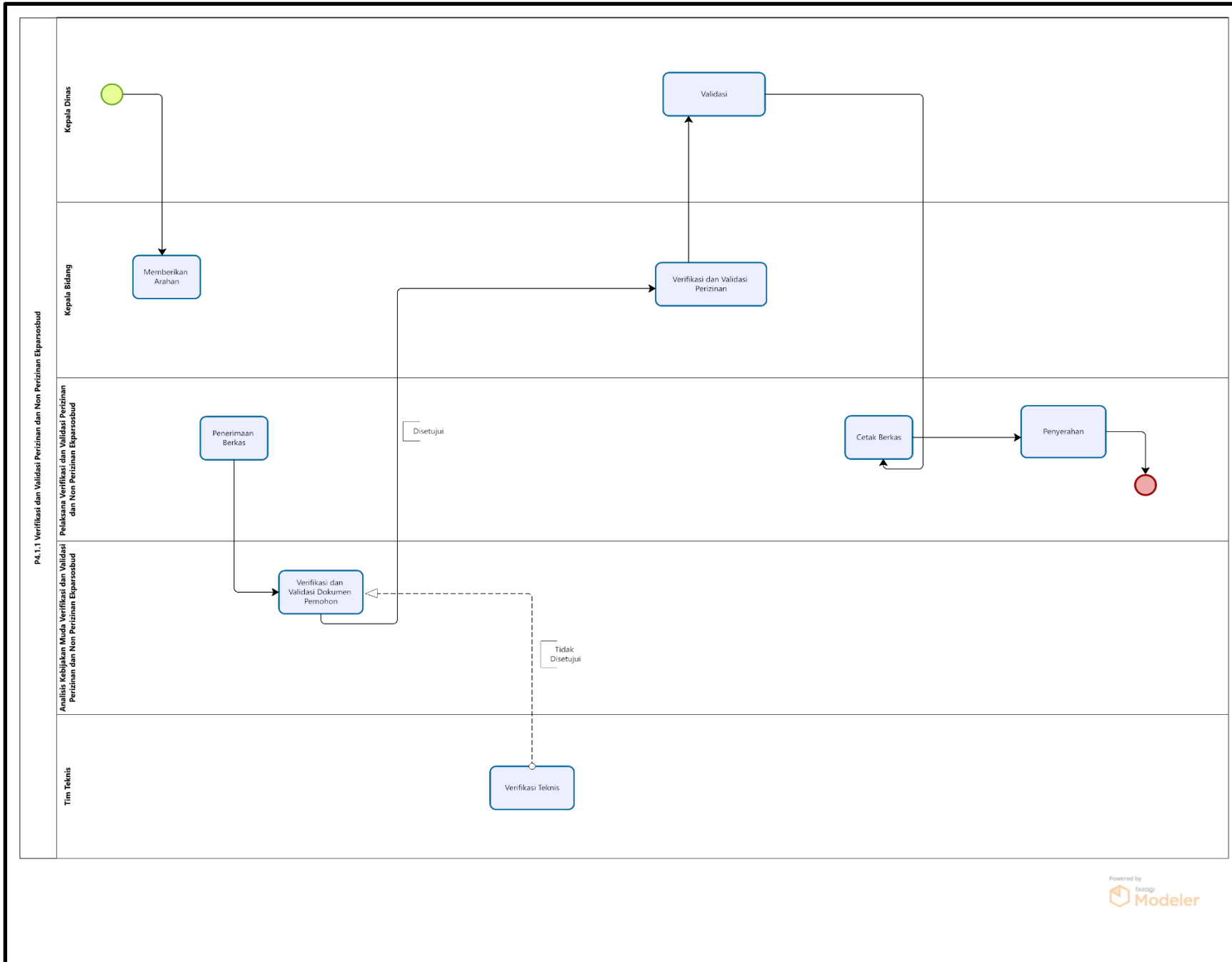




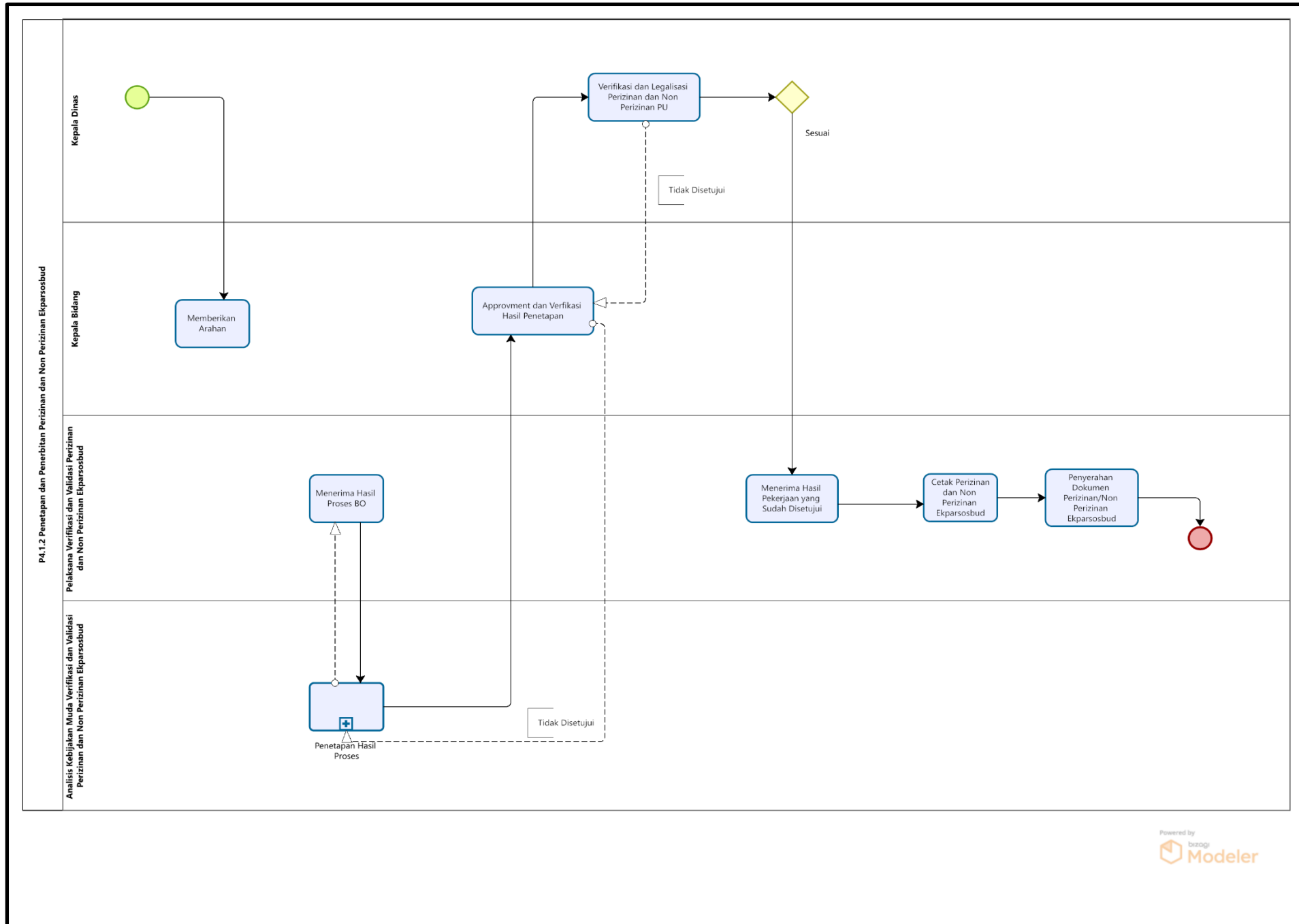


N4 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

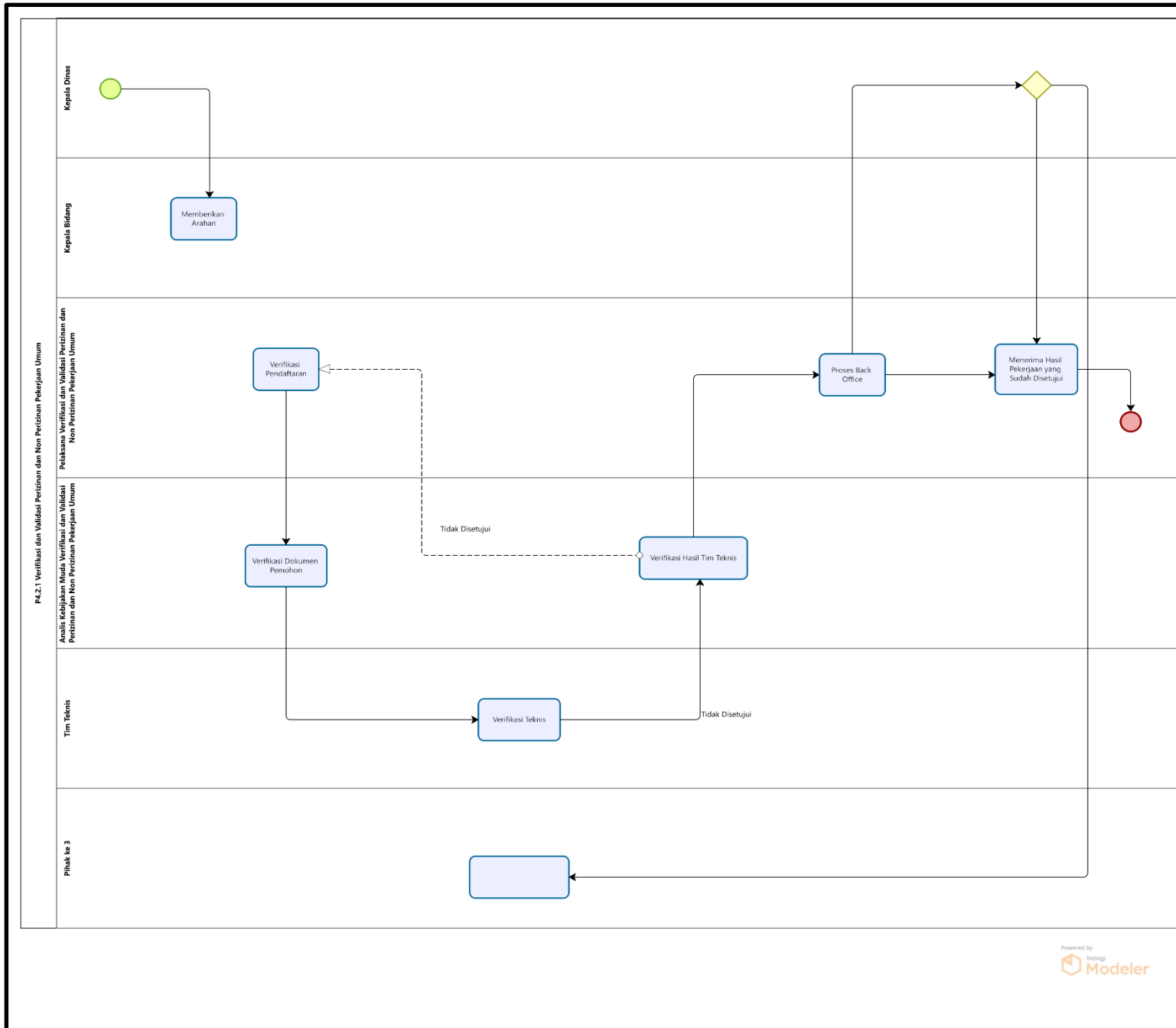
N4.1.1 Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Eksparsosbud



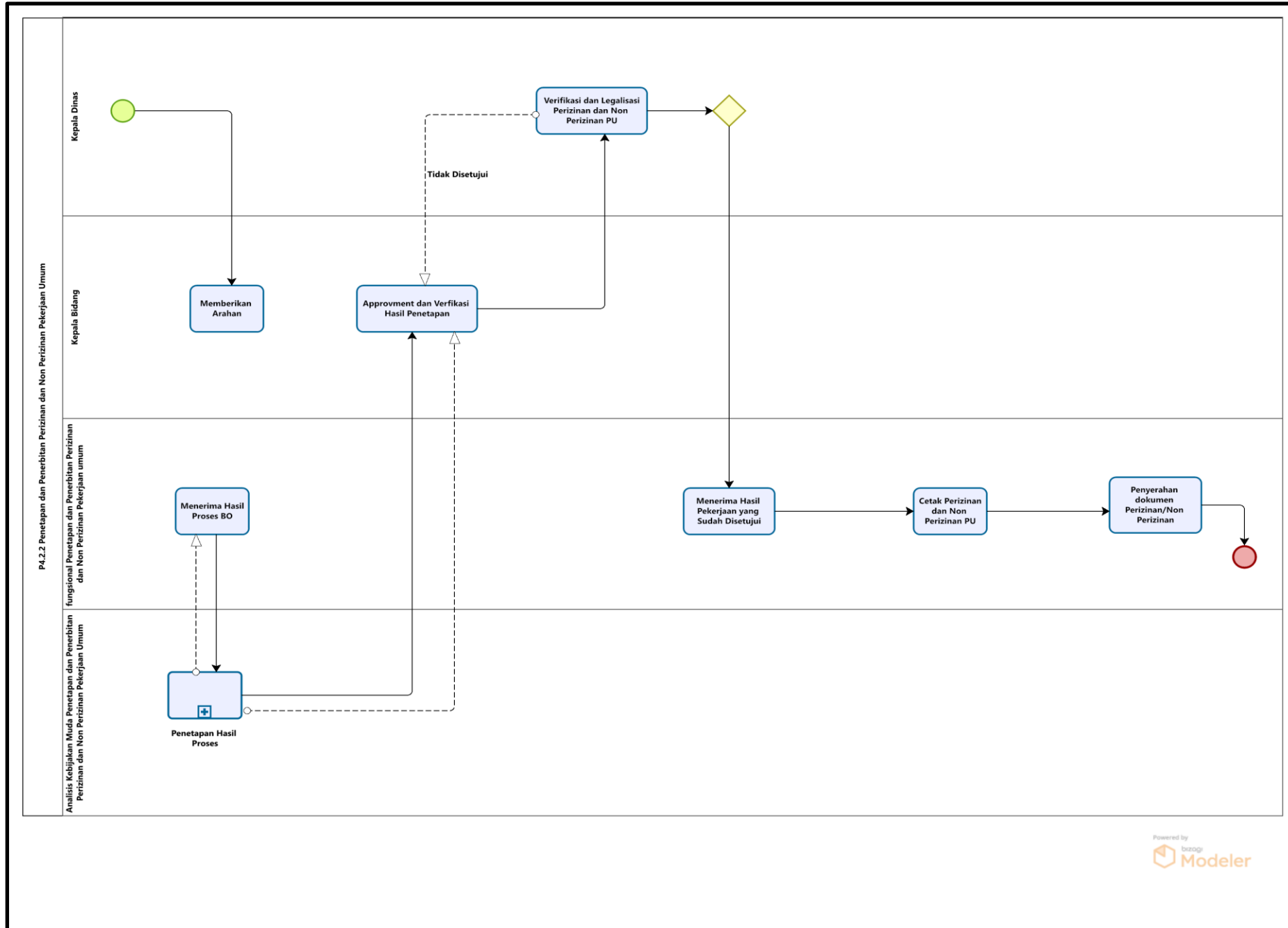
N4.1.2 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Eksparsosbud



N4.2.1 Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum



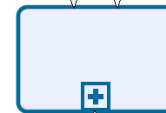
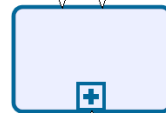
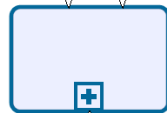
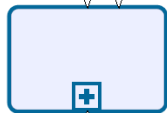
N4.2.2 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

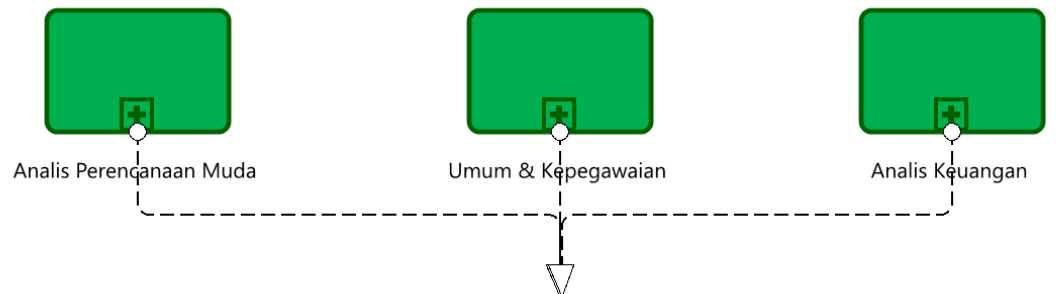


P5 UMUM DAN KEPEGAWAIAN

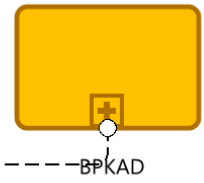
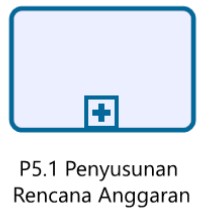


P5 Umum dan Kepegawaian





P5.1 Penyusunan Rencana Anggaran

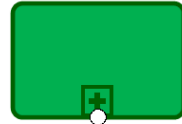




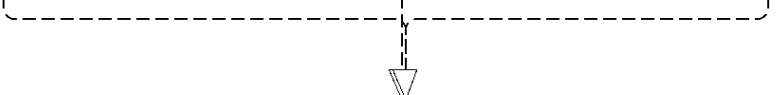
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



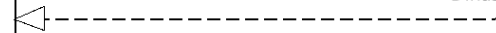
P5. 2 Penerimaan, Pendistribusian Surat dan Kearsipan

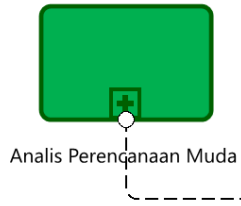


P5. 2 Penerimaan,
Pendistribusian
Surat dan Kearsipan

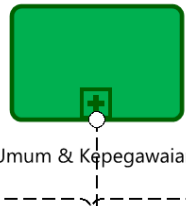


Dinas Terkait

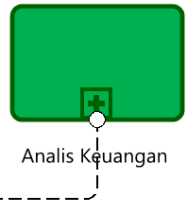




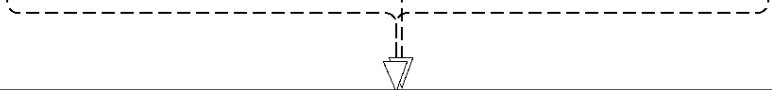
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



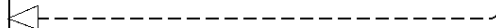
P5. 3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat



P5. 3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat

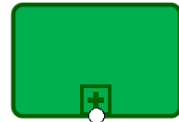


Dinas Terkait





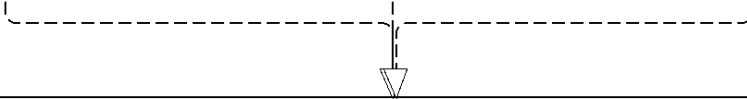
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P5. 4 Perencanaan Kebutuhan Kepegawaian



P5. 4 Perencanaan Kebutuhan Kepegawaian



BKPSDM

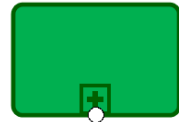




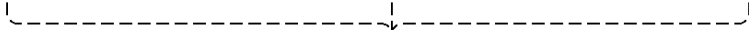
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



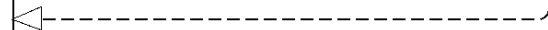
P5. 5 Pelaksanaan Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang Inventaris

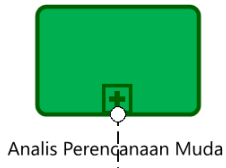


P5. 5 Pelaksanaan Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang Inventaris

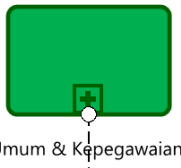


BPKAD

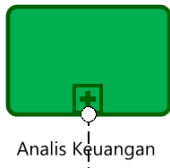




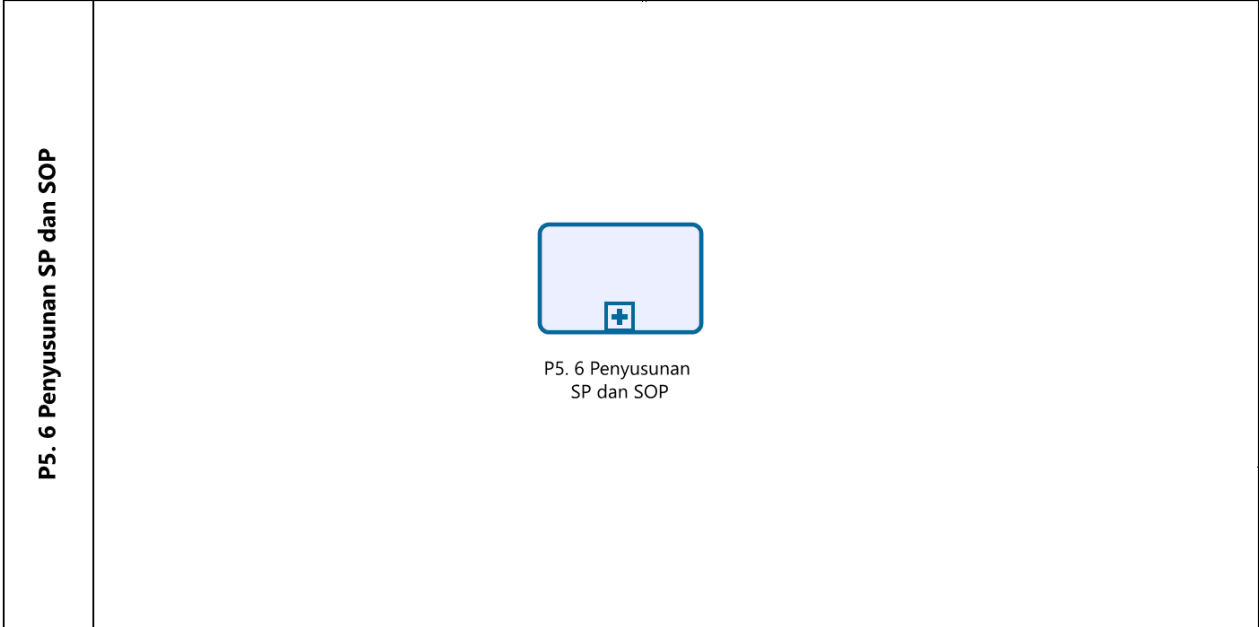
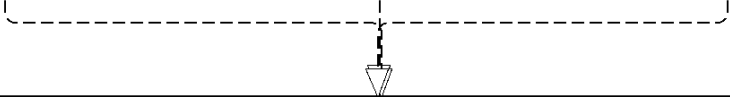
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P5. 6 Penyusunan SP dan SOP



P5. 6 Penyusunan
SP dan SOP

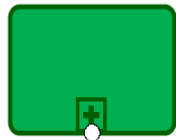


Dinas Terkait





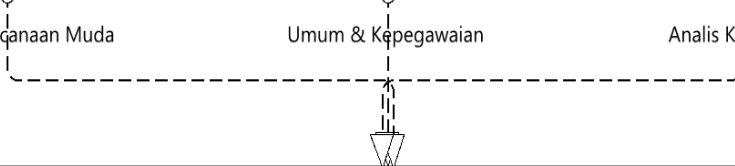
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



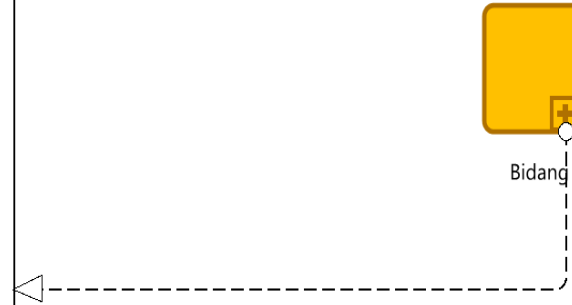
P5. 7 Menyiapkan Evaluasi dan Pelaporan Tugas Sekretariat



P5. 7 Menyiapkan Evaluasi dan Pelaporan Tugas Sekretariat

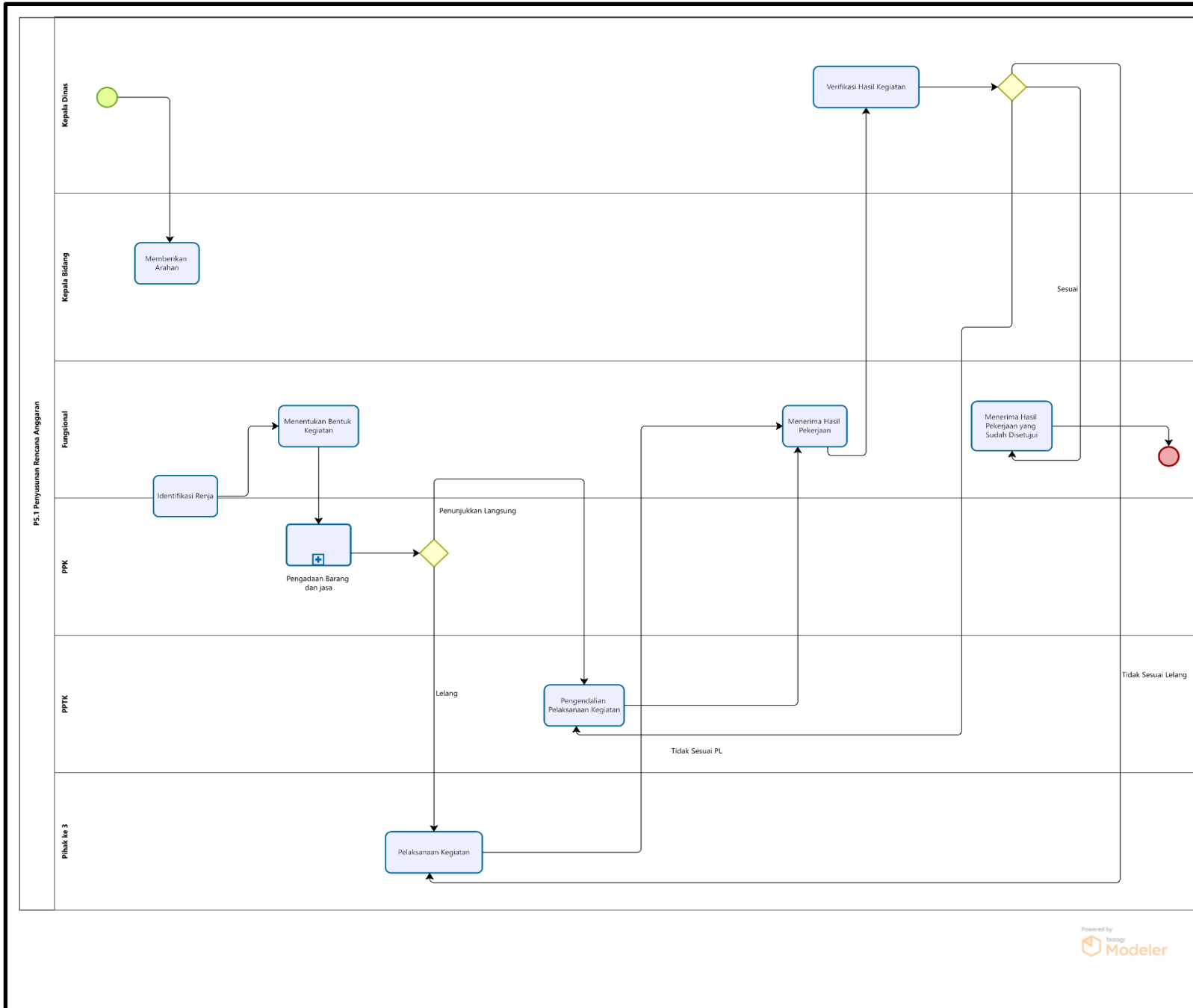


Bidang Terkait

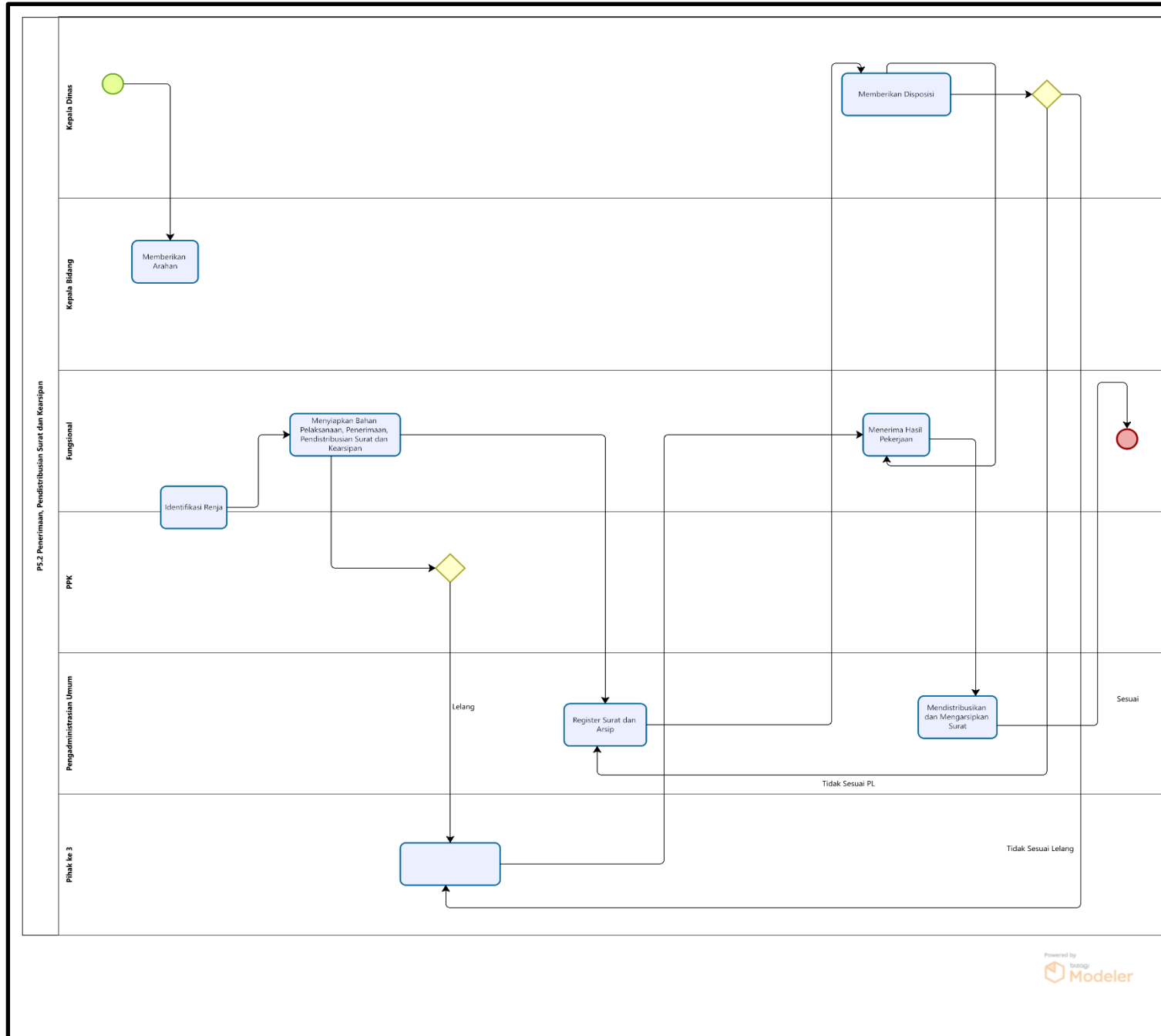


P5 UMUM DAN KEPEGAWAIAN

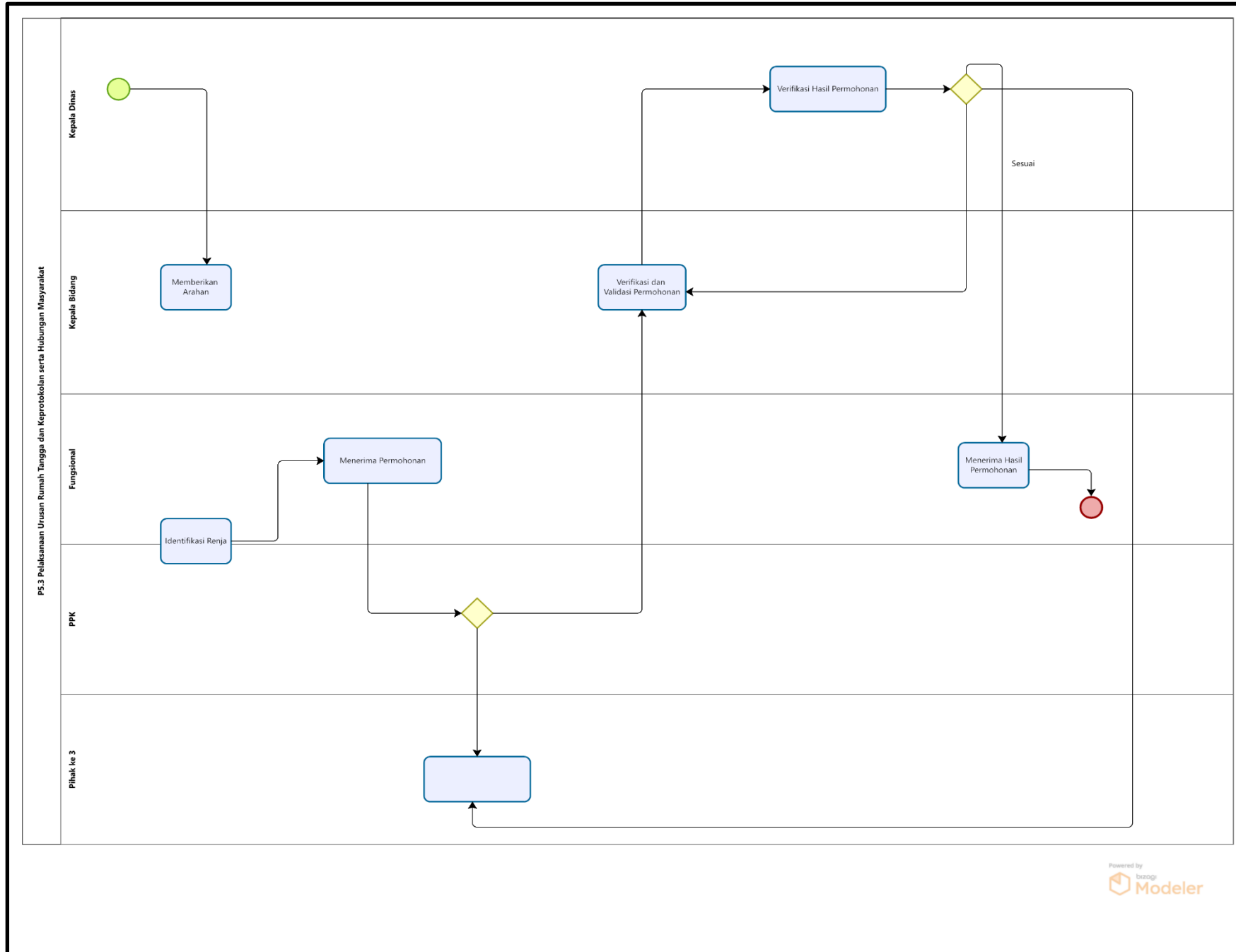
N5.1 Penyusunan Rencana Anggaran



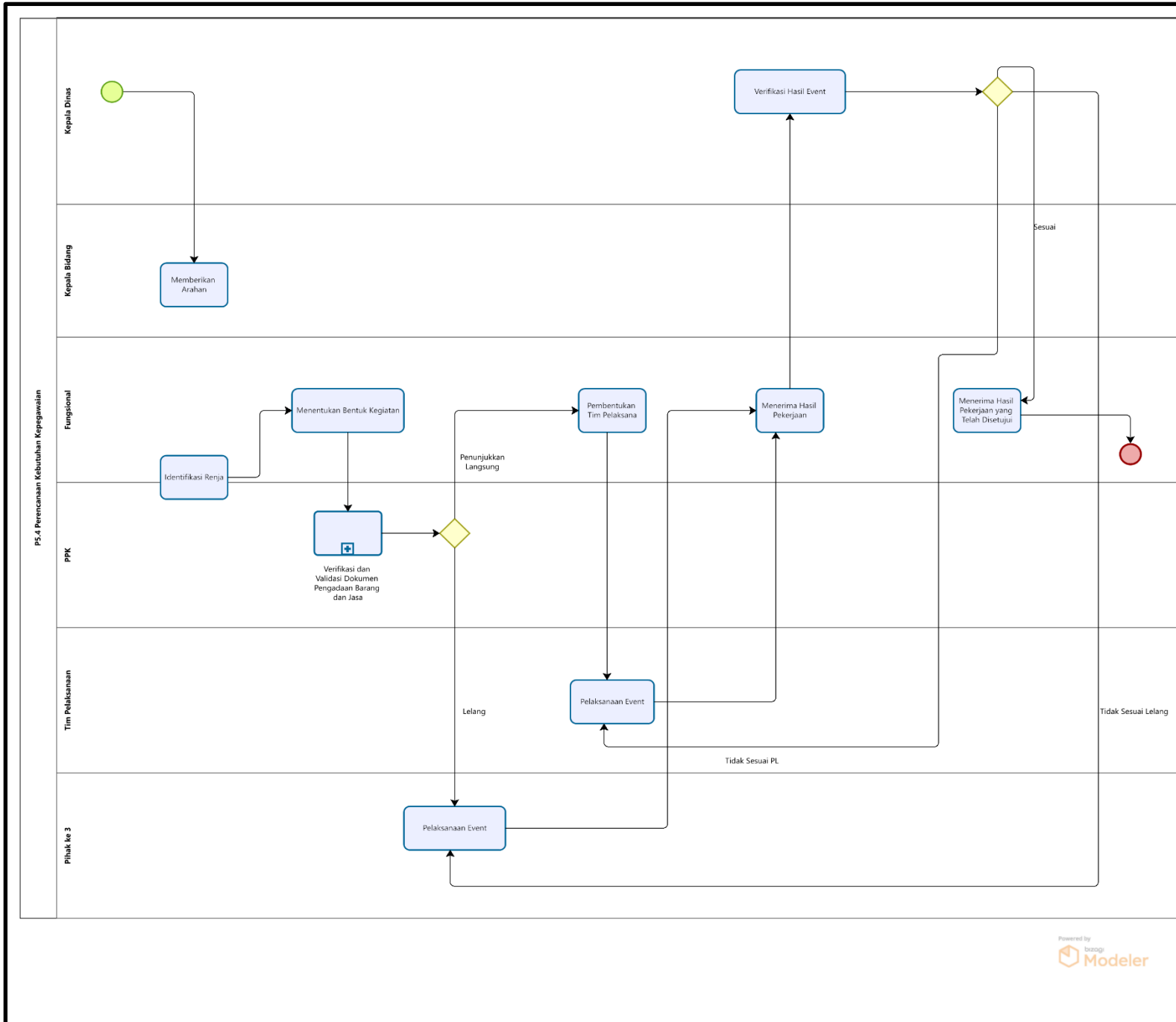
N5.2 Penerimaan, Pendistribusian Surat dan Kearsipan



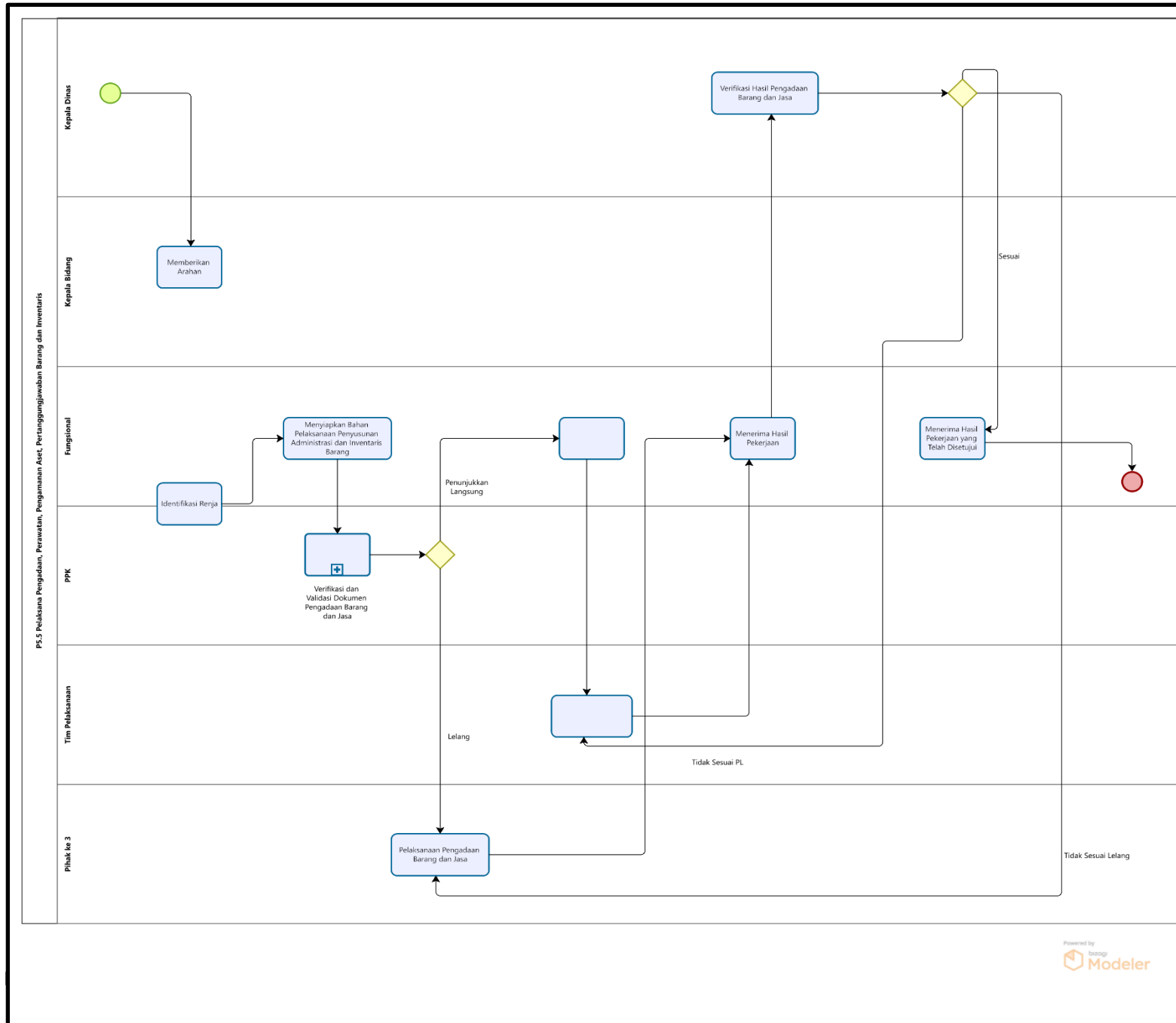
N5.3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat



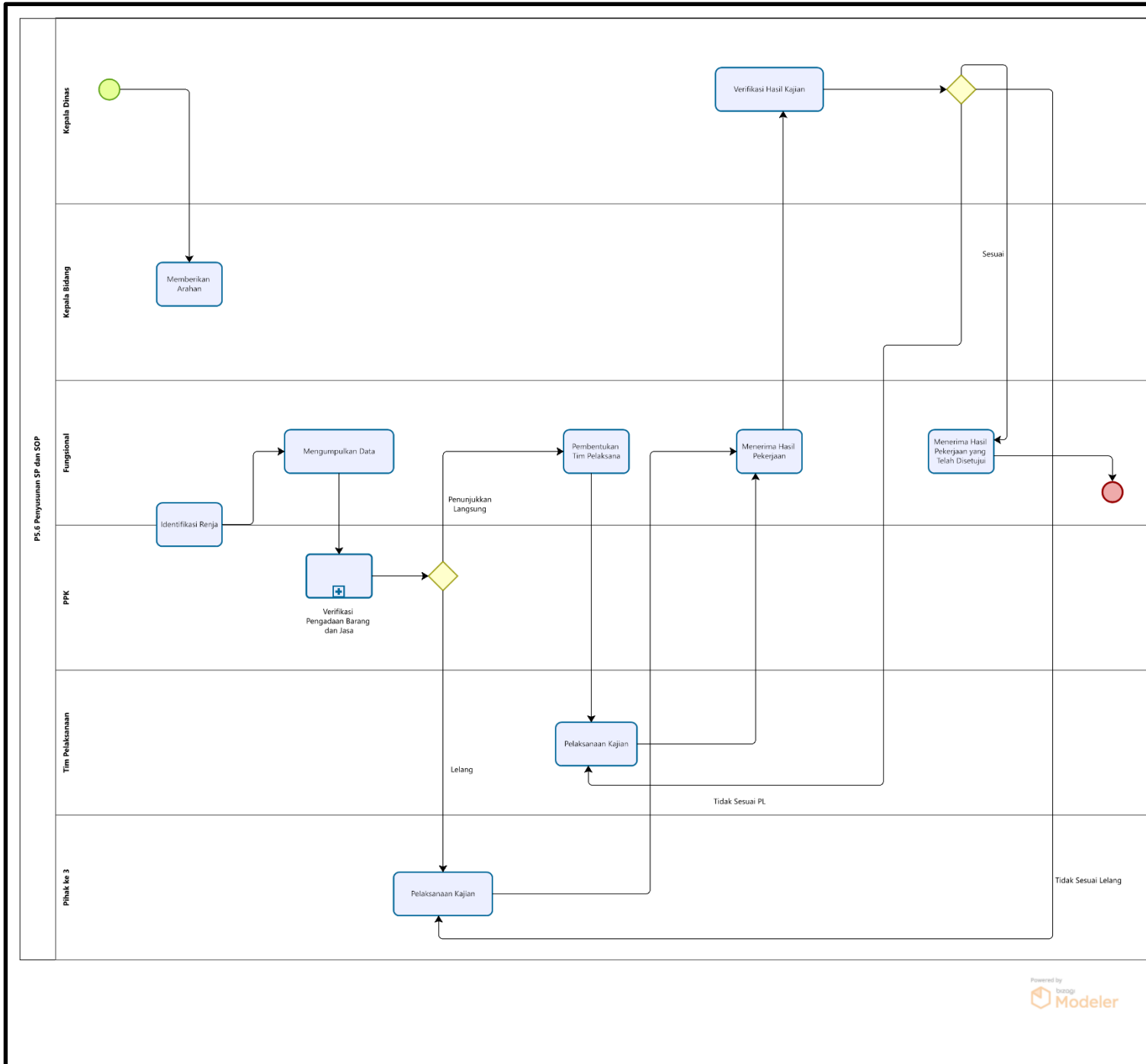
N5.4 Perencanaan Kebutuhan Kepegawaian



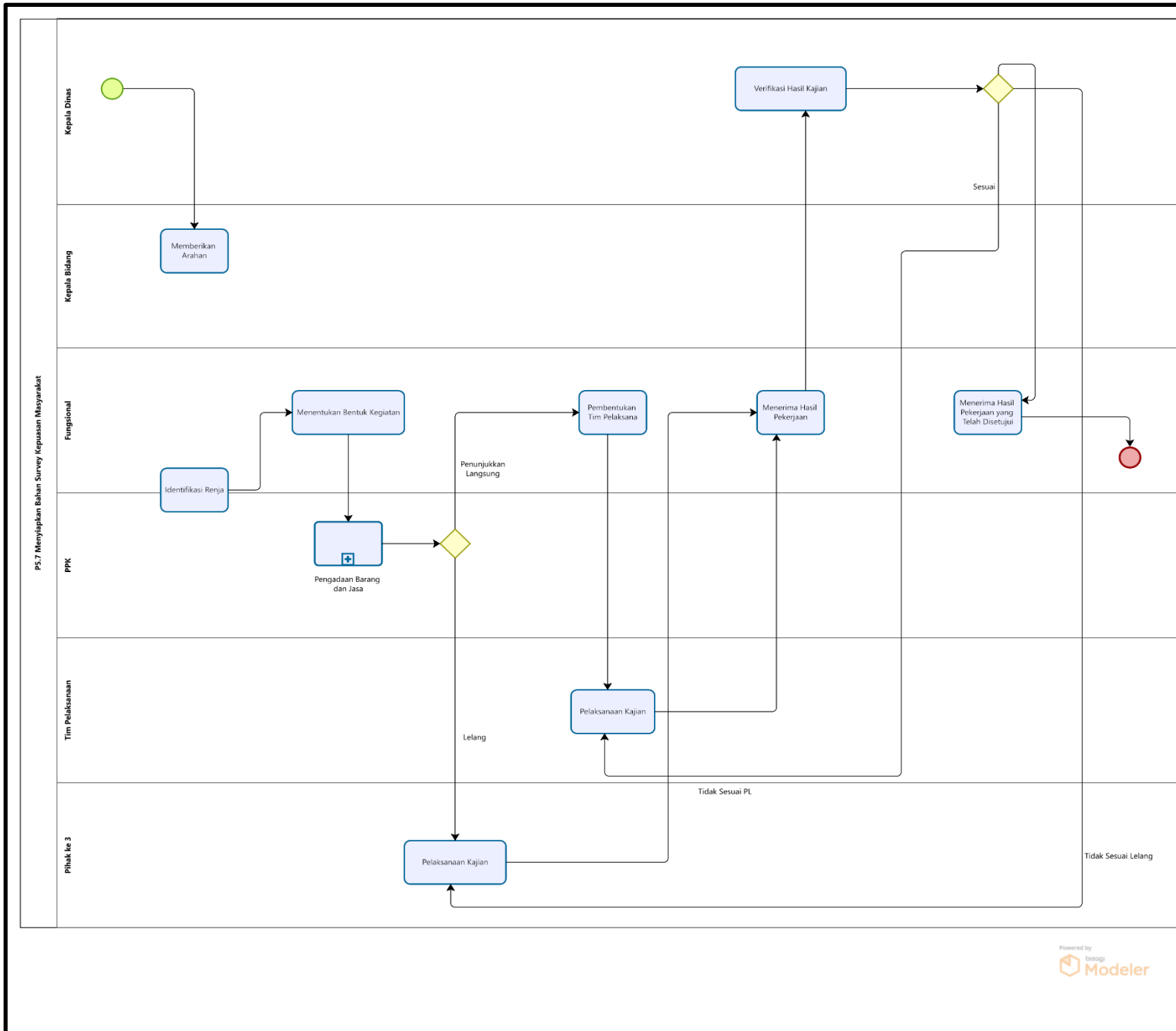
N5.5 Pelaksana Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang dan Inventaris



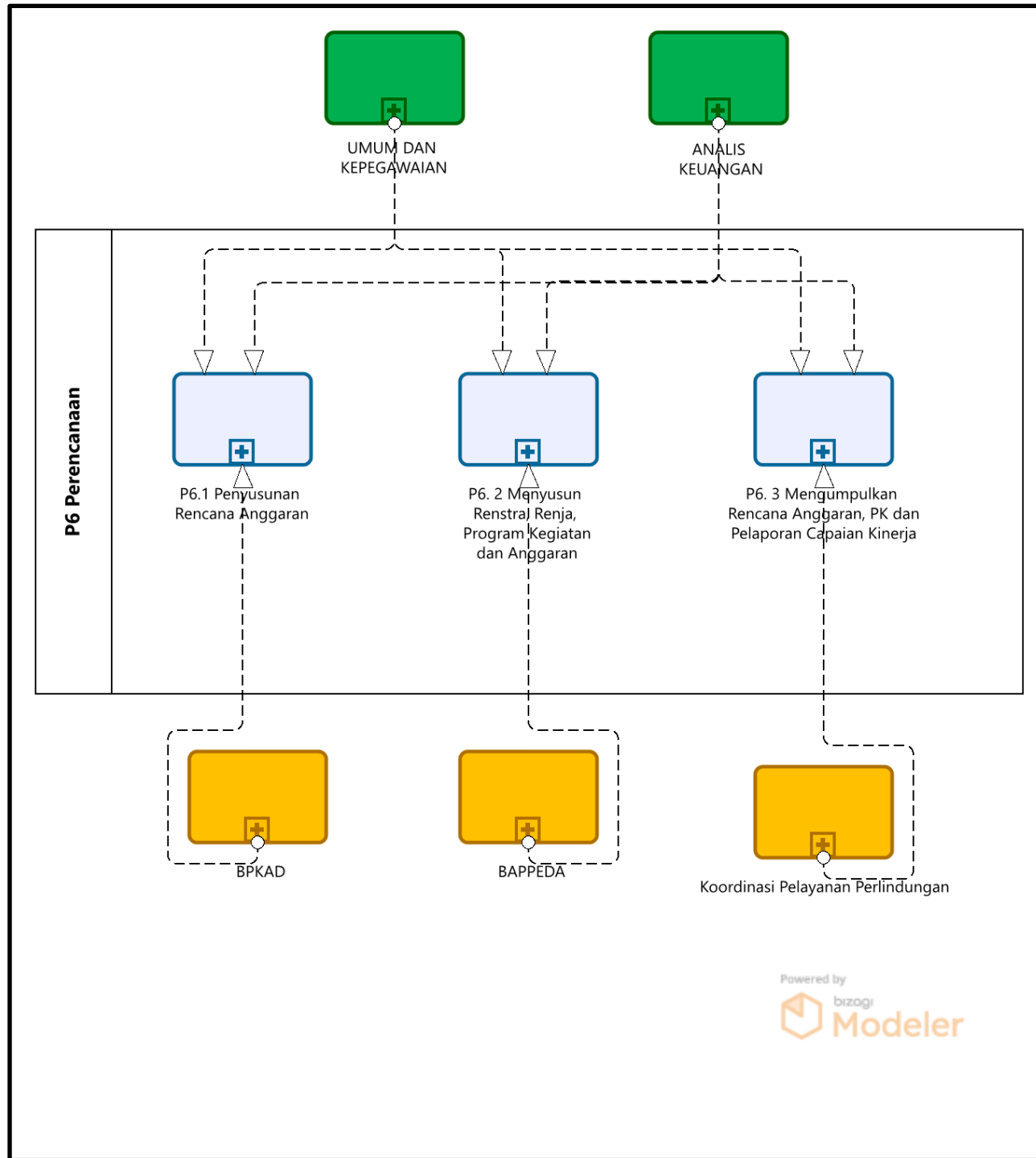
N5.6 Penyusunan SP dan SOP

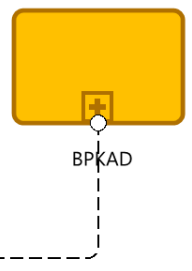
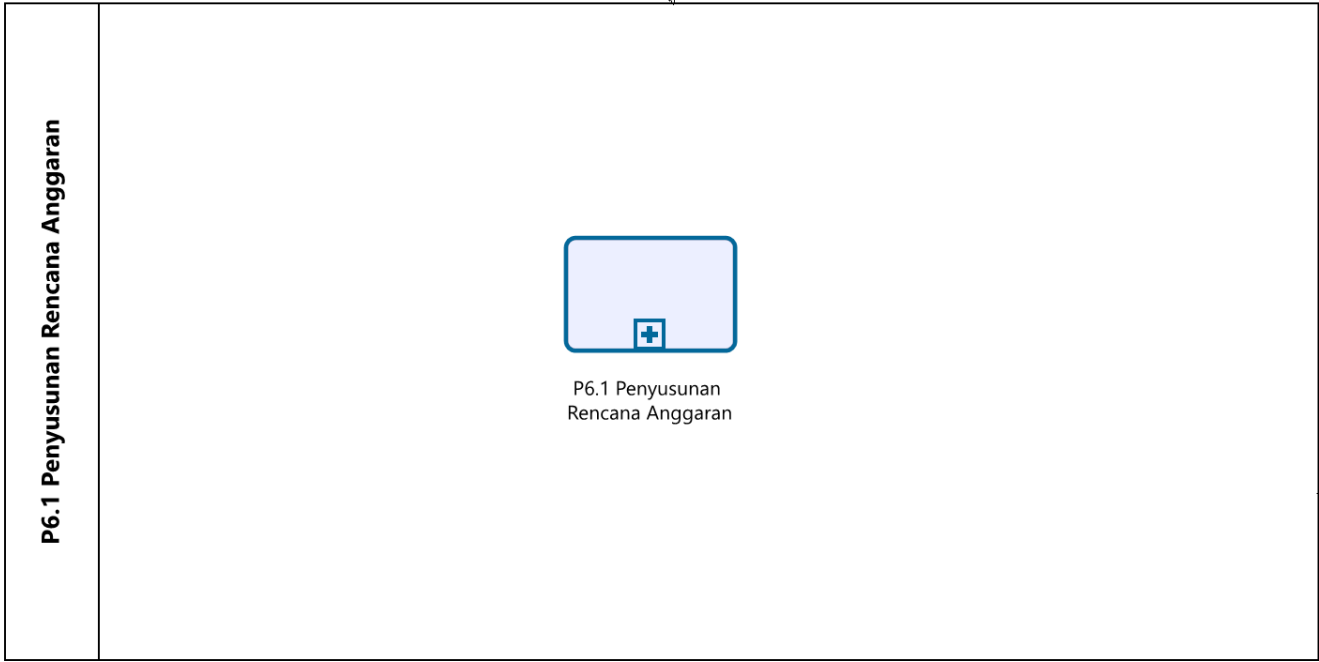
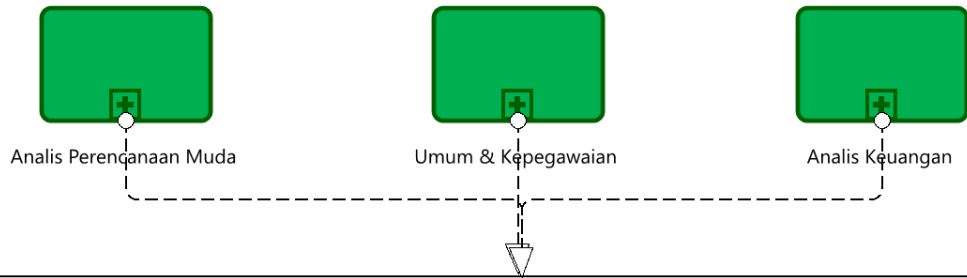


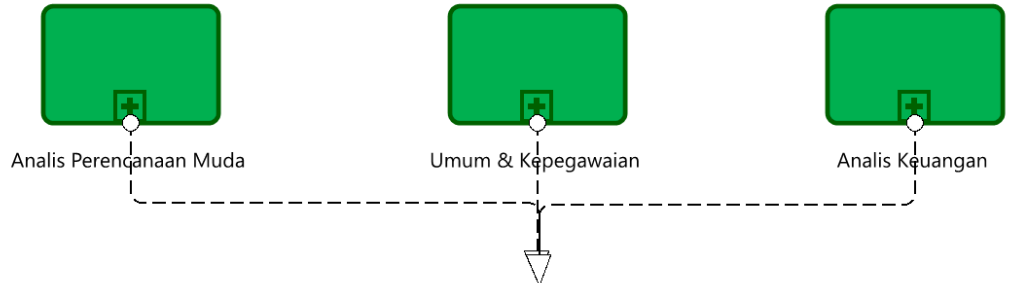
N5.7 Menyiapkan Bahan Survey Kepuasan Masyarakat



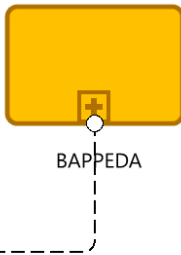
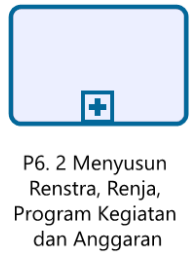
P6 ANALIS PERENCANA MUDA

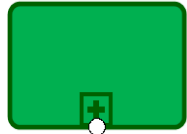




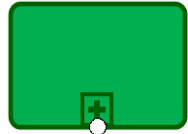


P6. 2 Menyusun Renstra, Renja, Program Kegiatan dan Anggaran

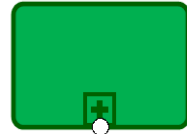




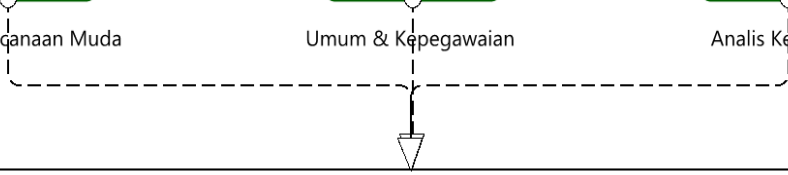
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P6.3 Mengumpulkan Rencana Anggaran, PK dan Pelaporan Capaian Kerja



P6.3
Mengumpulkan
Rencana Anggaran,
PK dan Pelaporan
Capaian Kerja

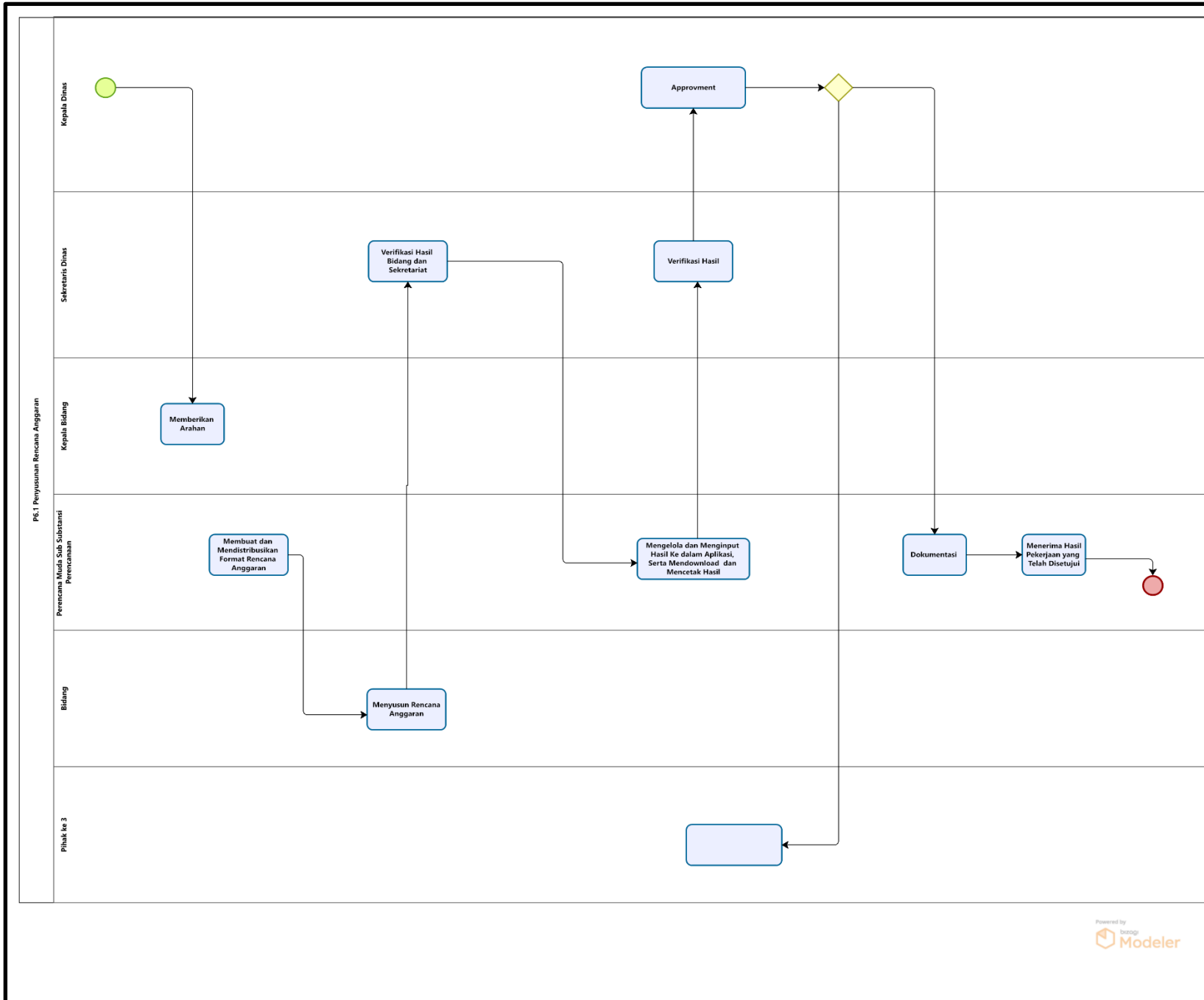


Koordinasi Pelayanan Perlindungan

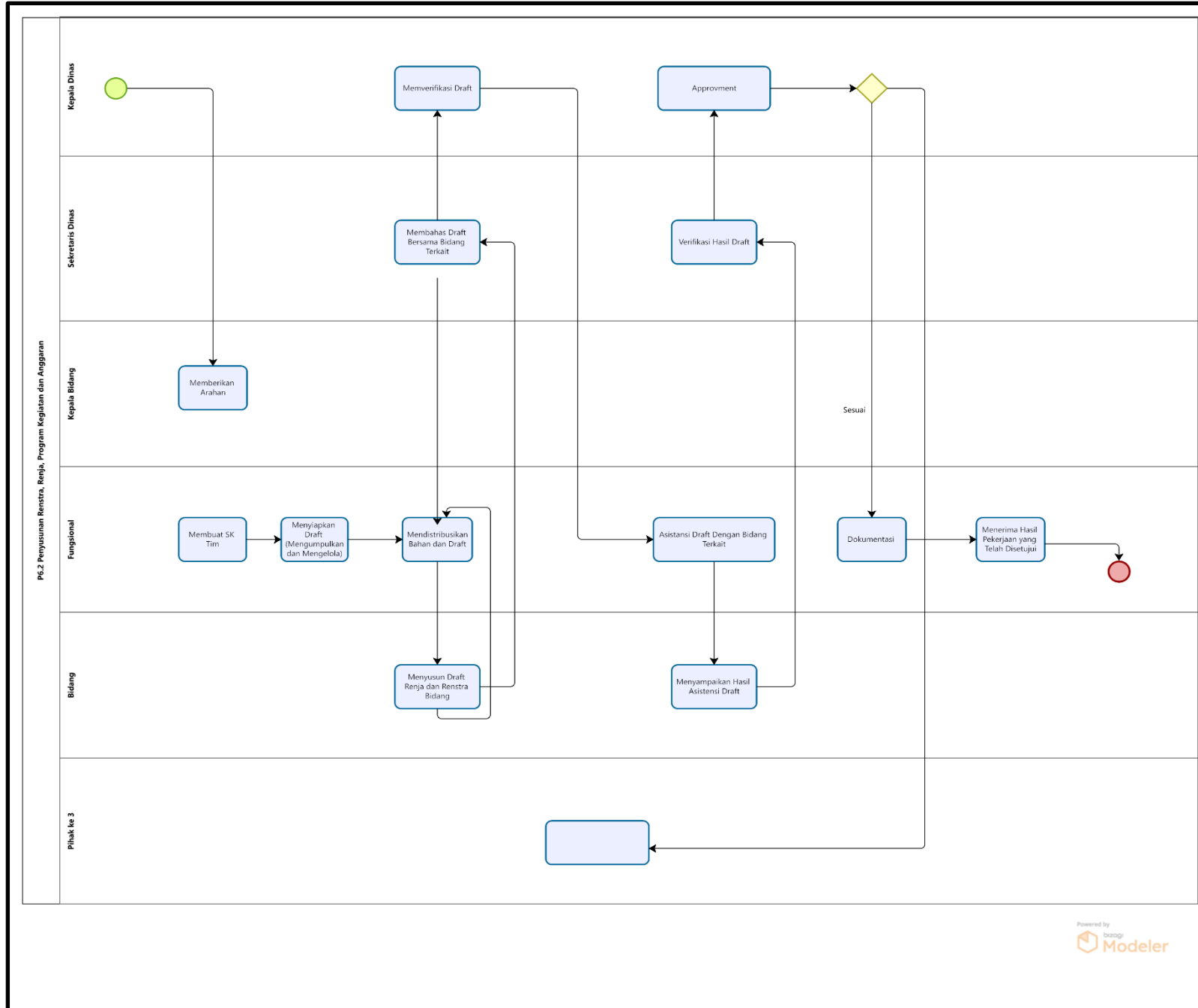


N6 ANALIS PERENCANA MUDA

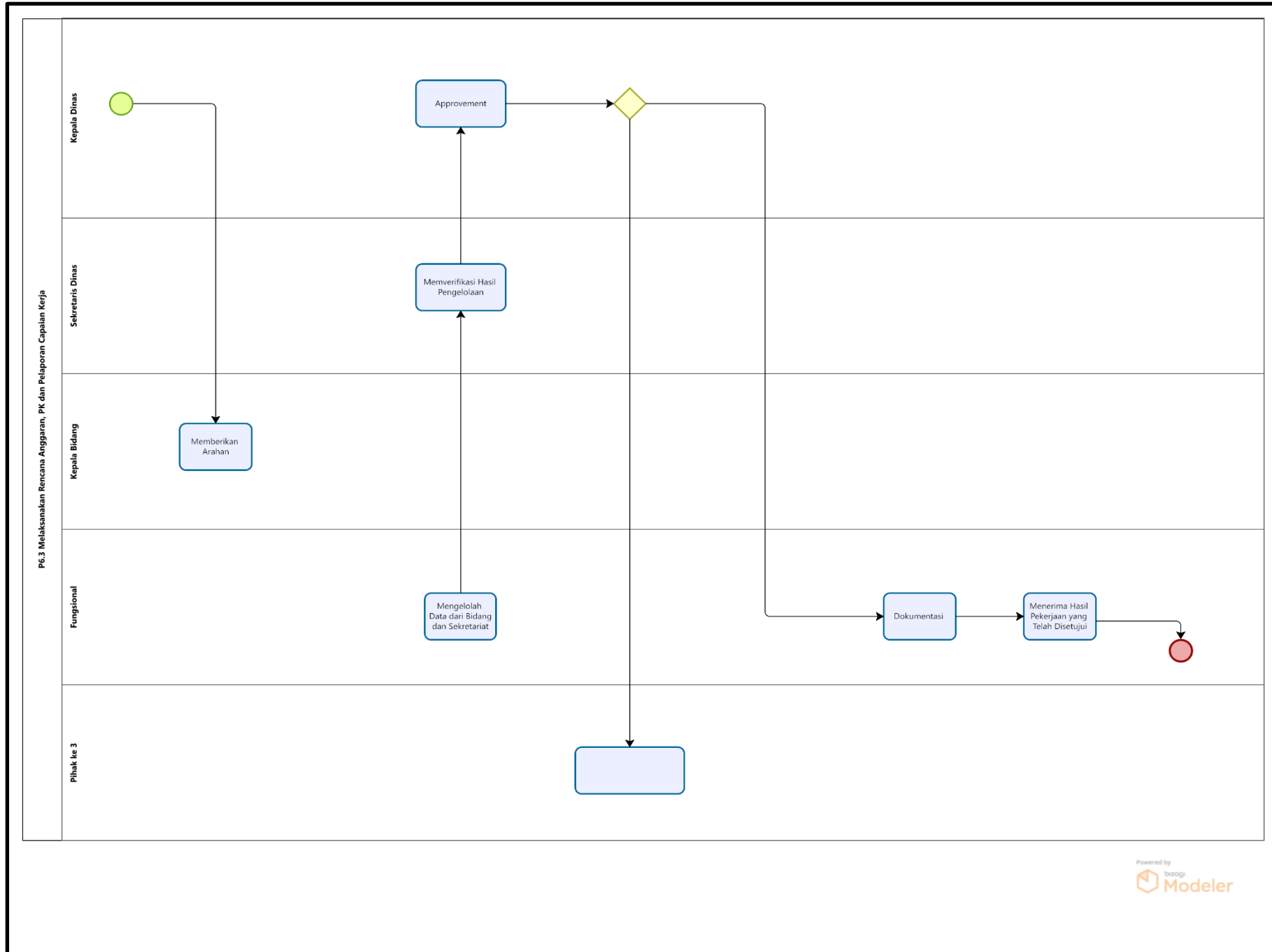
N6.1 Penyusunan Rencana Anggaran



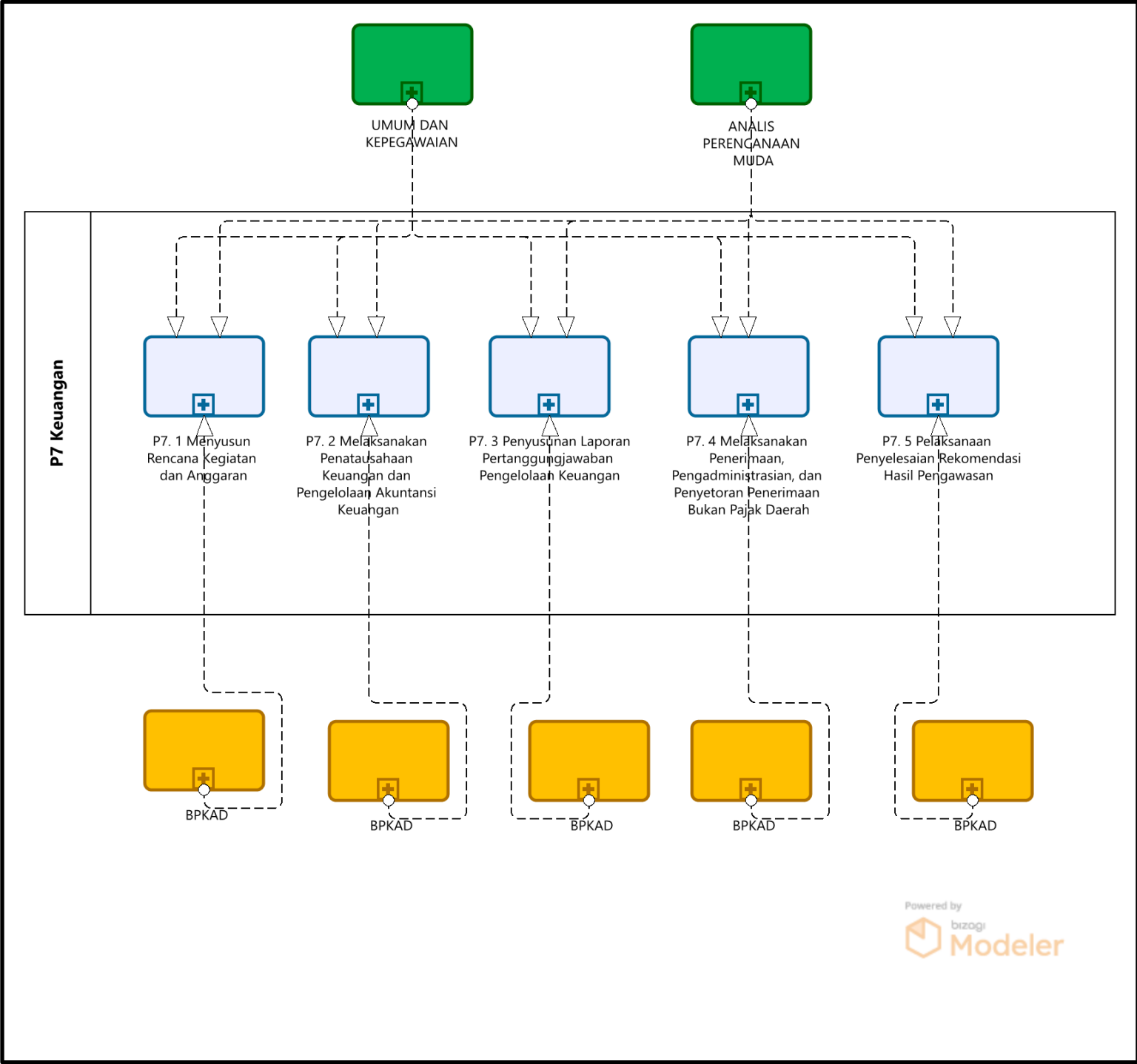
N6.2 Penyusunan Renstra, Renja, Program Kegiatan dan Anggaran

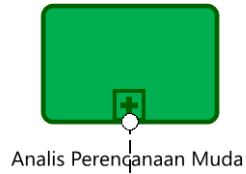


N6.3 Melaksanakan Rencana Anggaran, PK dan Pelaporan Capaian Kerja

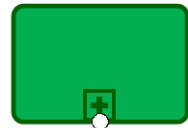


P7 ANALIS KEUANGAN

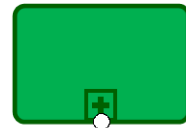




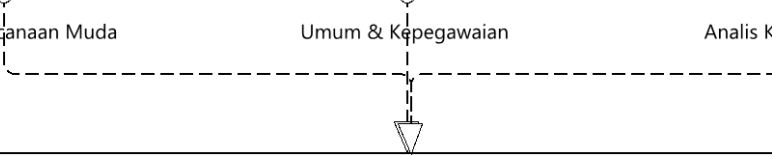
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P7. 1 Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran



P7. 1 Menyusun
Rencana Kegiatan
dan Anggaran

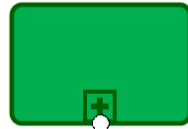


BPKAD





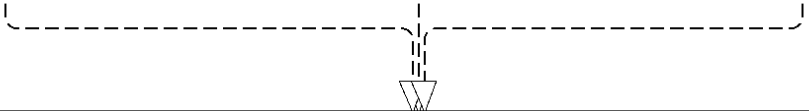
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



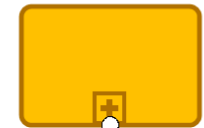
Analisis Keuangan



P7.2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan

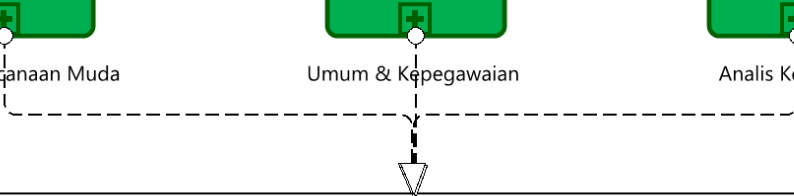
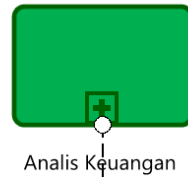
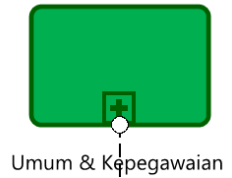
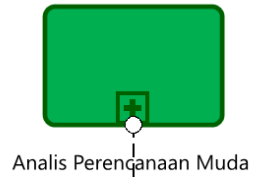


P7.2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan



BPKAD

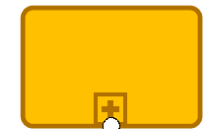




P7.3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

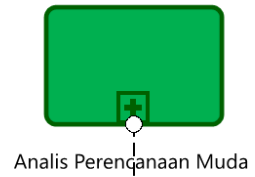


P7.3 Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pengelolaan
Keuangan



BP&AD





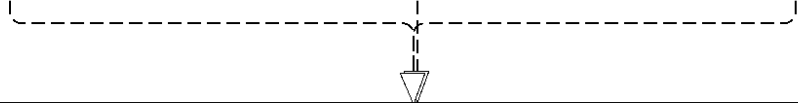
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kpegawaian



Analisis Keuangan



P7. 4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah



P7. 4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah

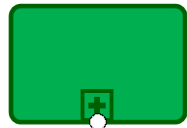


BPKAD

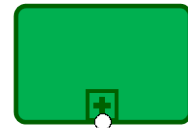




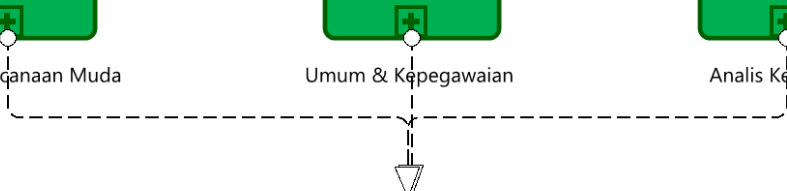
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



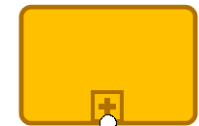
Analisis Keuangan



P7. 5 Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan



P7. 5 Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan

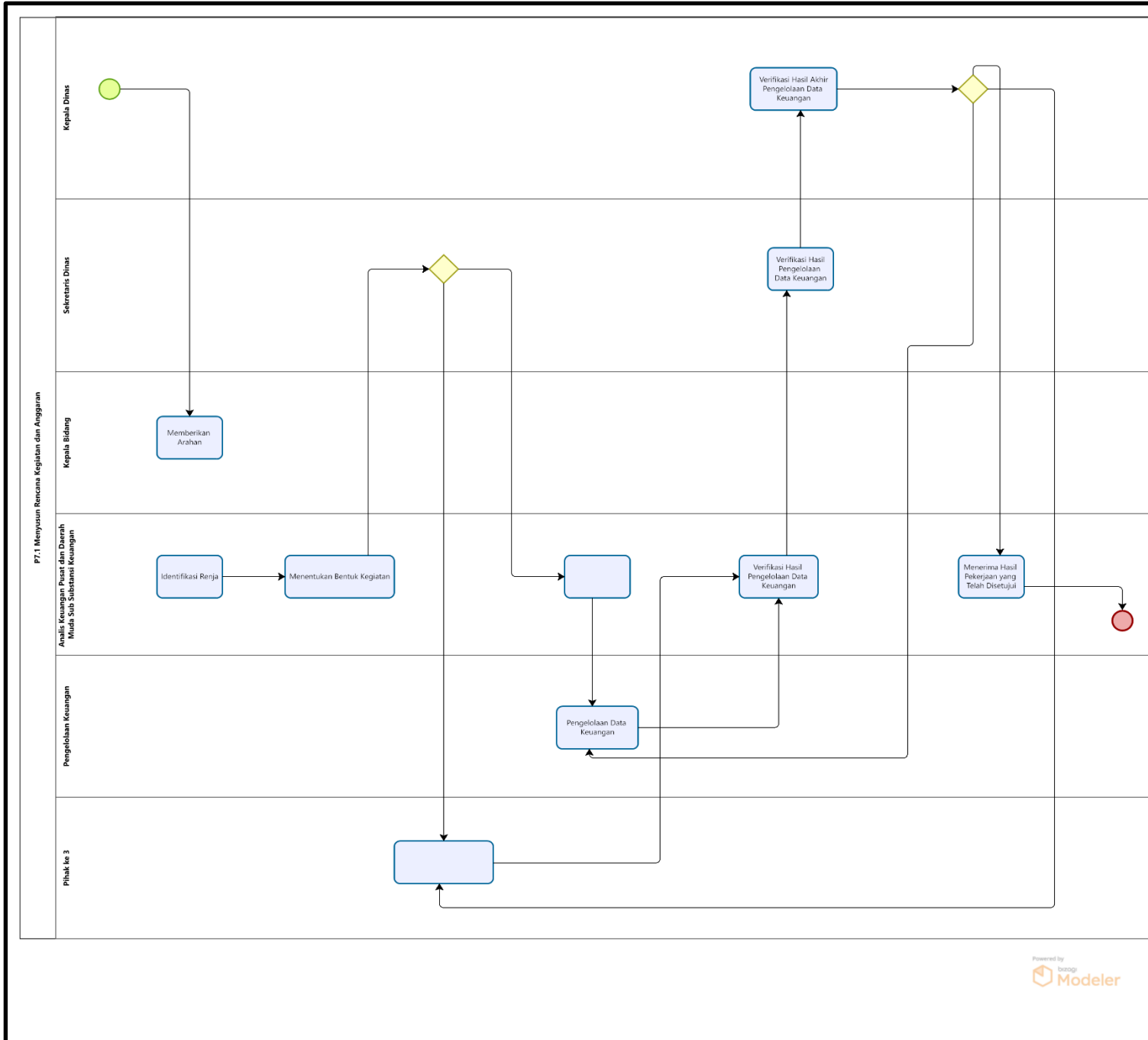


BPKAD

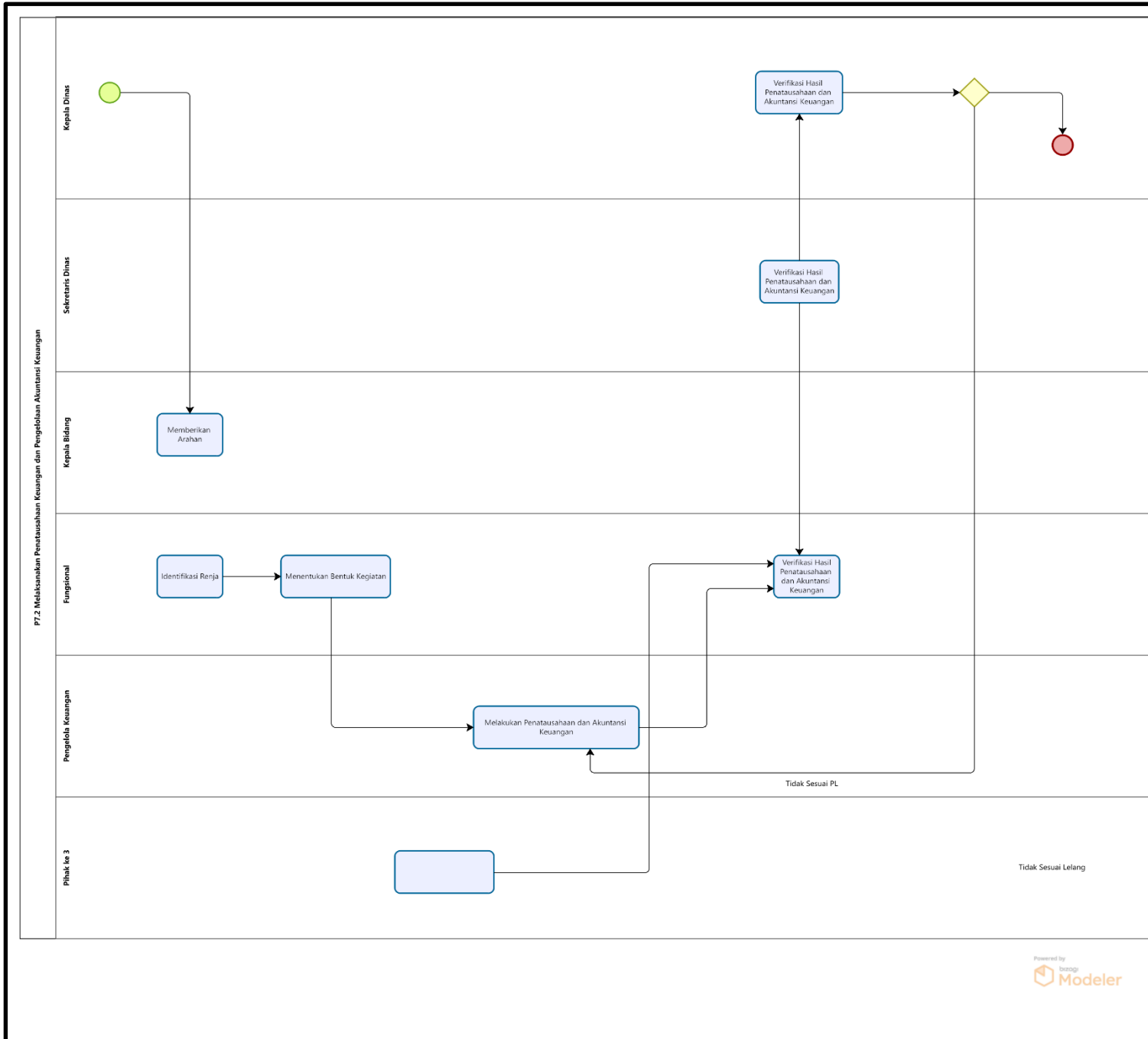


N7 ANALIS KEUANGAN

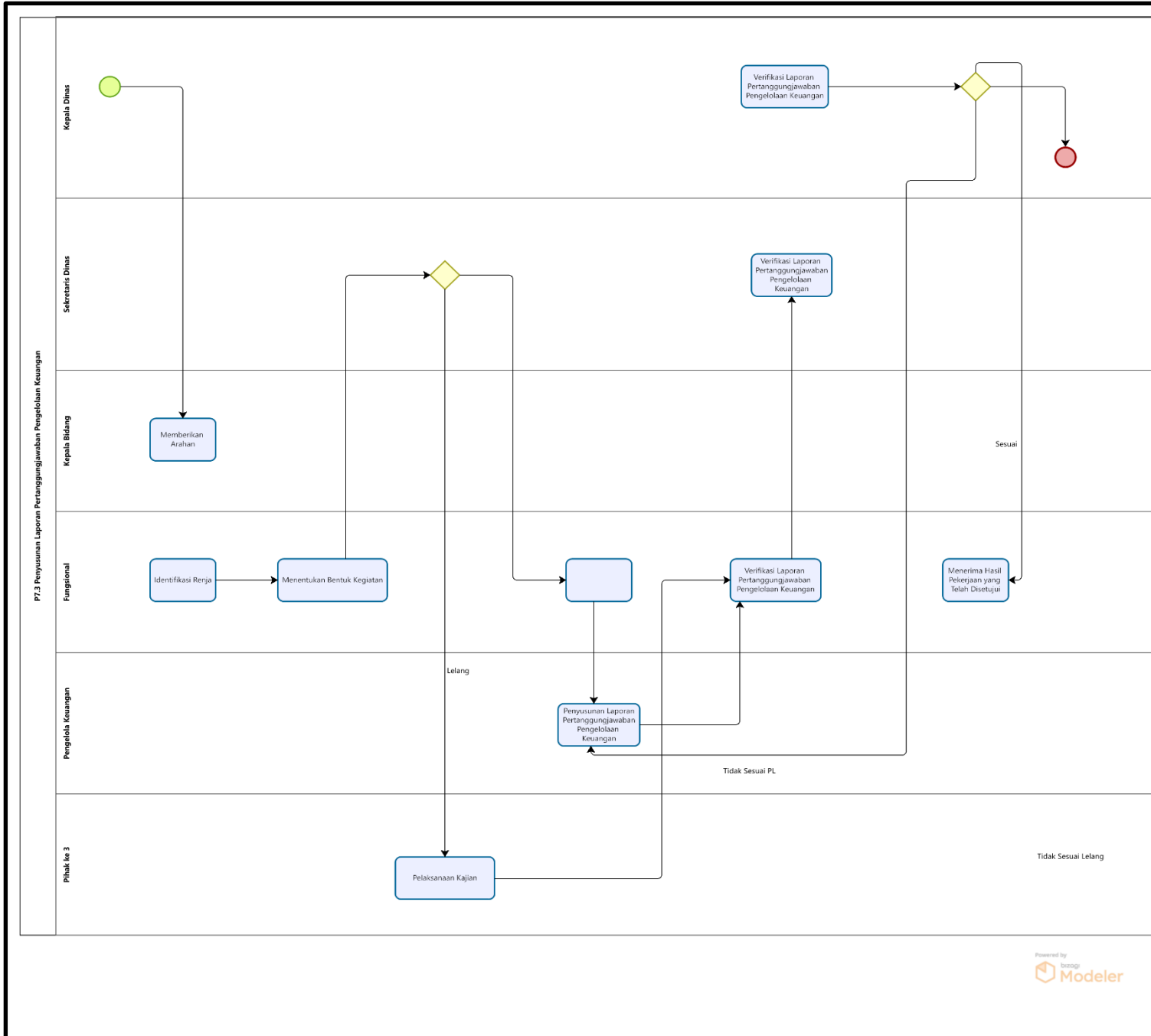
N7.1 Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran



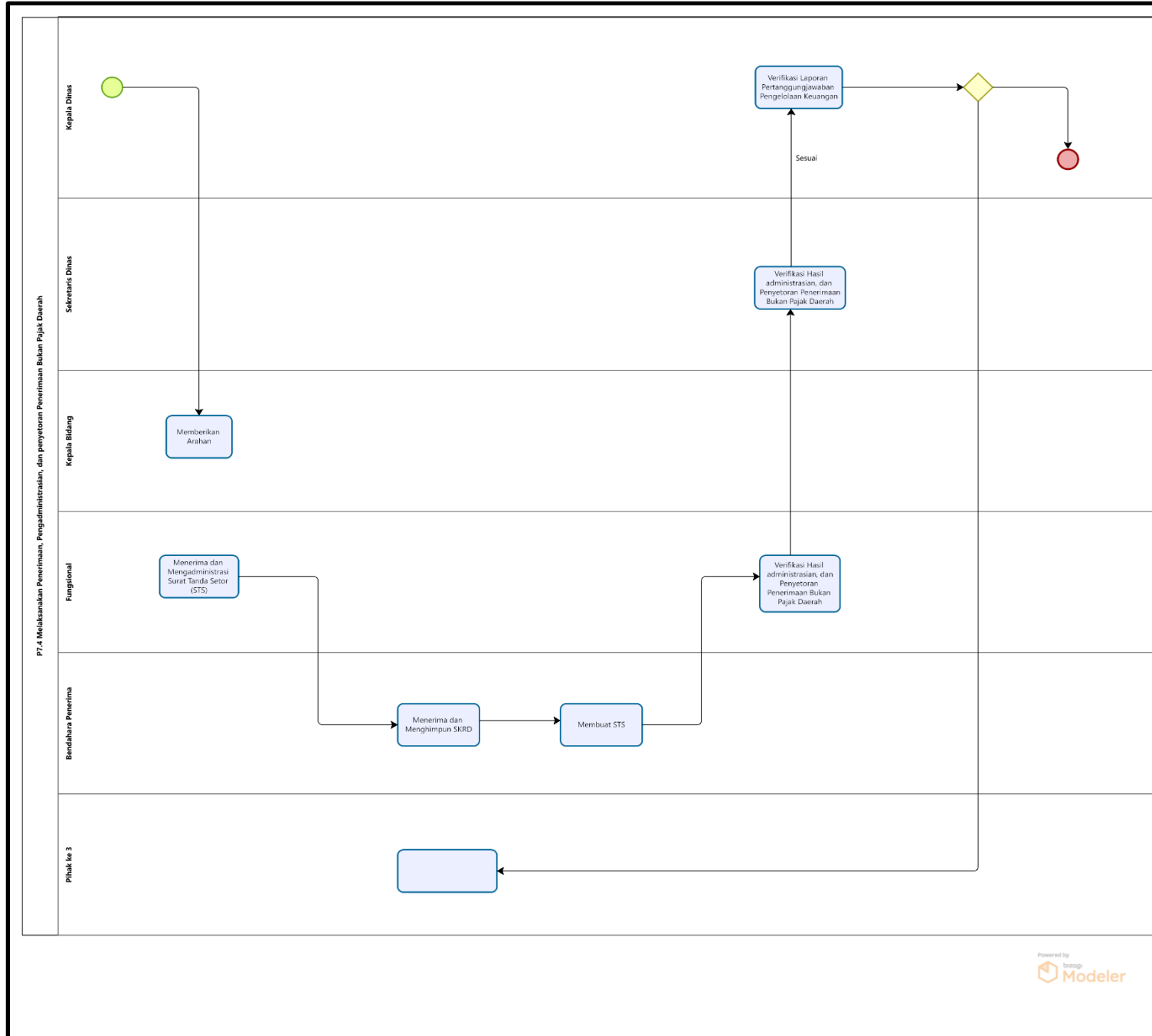
N7.2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan



N7.3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan



N7.4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah



N7.5 Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan

